

# **PENDIDIKAN KEJURUAN MASA DEPAN**

Oleh:  
Husaini Usman  
Darmono

**PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2016**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya naskah yang berjudul, “Pendidikan Kejuruan Masa Depan” akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Naskah ini terdiri atas tiga bab.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan filosofis, yuridis, teoretis, empiris, tujuan, dan manfaat penulisan naskah. Bab II Kajian teoretis berisikan perkembangan SMK masa depan, kompetensi lulusan SMK masa depan, *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri masa depan, kompetensi guru SMK masa depan, sertifikasi guru, dan kepemimpinan Kepala SMK masa depan serta pembahasan. Bab III Simpulan dan Saran berisikan simpulan dan saran.

Pada kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dan Kebudayaan beserta staf yang telah memberi kesempatan, memfasilitasi penyelesaian administrasi dan seminar sehari penuh, serta membiayai penulisan naskah ini.

Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah memberikan masukan-masukan demi sempurnanya naskah ini. Tim penulis berharap semoga naskah ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 8 Desember 2016

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>A. Latar Belakang</b>	1
<b>B. Landasan Filosofis</b>	1
<b>C. Landasan Yuridis</b>	3
<b>D. Landasan Teoretis</b>	9
<b>E. Landasan Empiris</b>	24
<b>F. Tujuan</b>	44
<b>G. Output dan Manfaat</b>	44
1. Output	44
2. Manfaat	45
 <b>BAB II KAJIAN TEORETIS</b>	 46
<b>A. Pengembangan SMK Masa Depan dan Pembahasan</b>	46
1. Pengembangan SMK Masa Depan	46
2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan	57
3. <i>Link and Match</i> SMK dengan Dunia Usaha/Industri	65
4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan	76
5. Sertifikasi Guru SMK Produktif	80
6. Kepemimpinan Kepala SMK Masa Depan	81
<b>B. Pembahasan</b>	89
1. Pengembangan SMK Masa Depan	89
2. Kompetensi Lulusan SMK Masa	91

	<b>Depan</b>	
	<b>3. <i>Link and Match</i> SMK dengan Dunia Usaha/Industri</b>	93
	<b>4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan</b>	96
	<b>5. Sertifikasi Guru SMK Produktif</b>	99
	<b>6. Kepemimpinan Kepala SMK Masa Depan</b>	103
<b>BAB III</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	107
	<b>A. Simpulan</b>	107
	<b>1. Pengembangan SMK Masa Depan</b>	107
	<b>2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan</b>	108
	<b>3. <i>Link and Match</i> SMK dengan Dunia Usaha/Industri</b>	108
	<b>4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan</b>	108
	<b>5. Sertifikasi Guru SMK Produktif</b>	109
	<b>6. Kepemimpinan Kepala SMK Masa Depan</b>	109
	<b>B. Saran-saran</b>	110
	<b>1. Pengembangan SMK Masa Depan</b>	110
	<b>2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan</b>	112
	<b>3. <i>Link and Match</i> SMK dengan Dunia Usaha/Industri</b>	113
	<b>4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan</b>	113
	<b>5. Sertifikasi Guru SMK Produktif</b>	114
	<b>6. Kepemimpinan Kepala SMK Masa Depan</b>	114

**Depan**

**DAFTAR PUSTAKA**

116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

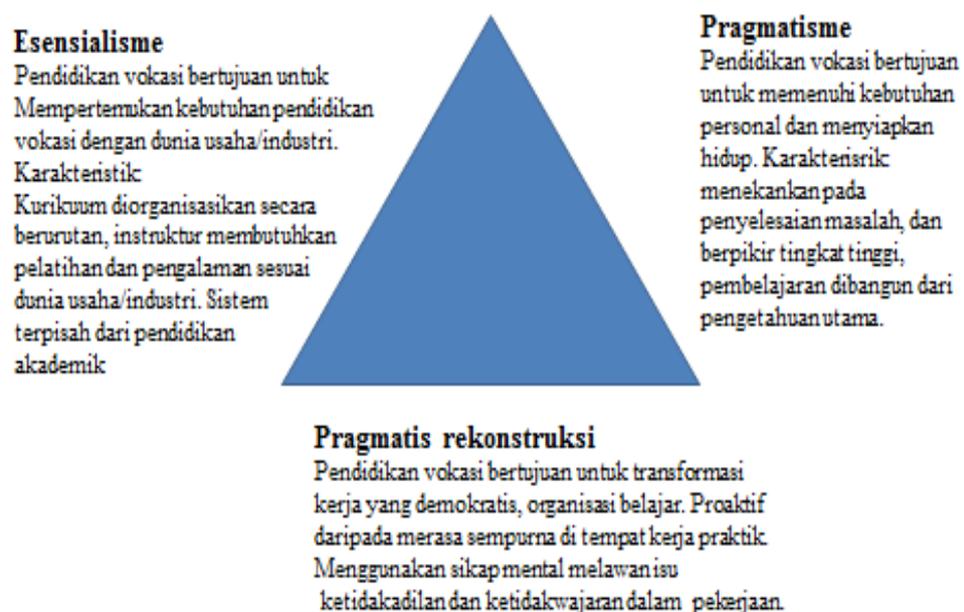
#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Landasan Filosofis**

Manusia adalah makhluk pekerja (*homo luden*). Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya sehari-hari baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bekerja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia selama ia masih normal, sehat, dan tidak malas. Agar hasil kerjanya pekerjaannya bermutu dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain dibutuhkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Keterampilan, sikap, dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Pendidikan yang memberikan bekal keterampilan untuk bekerja adalah pendidikan vokasi.

Secara filosofis, tujuan pendidikan vokasi ada tiga macam, yaitu: (1) esensialisme, (2) pragmatis, dan (3) pragmatis rekonstruksi. Tujuan pendidikan vokasi ditinjau dari esensialismen adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja ditandai dengan kurikulum yang diselenggarakan berurutan, instruktur perlu memiliki pengalaman yang berhubungan dengan industri yang luas. Sistem terpisah dari pendidikan akademis. Tujuan pendidikan vokasi ditinjau dari pragmatis adalah untuk memenuhi kebutuhan individu untuk pemenuhan pribadi dan persiapan kehidupan yang ditandai dengan penekanan pada penyelesaian masalah dan berpikir tingkat lebih tinggi, pembelajaran dibangun dari pengetahuan sebelumnya.

Tujuan pendidikan vokasi ditinjau dari pragmatisme rekonstruksi adalah untuk mengubah pekerjaan menjadi lebih demokratis, lebih proaktif, melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masalah kerja (Rojewski, 2009: 22). Filsafat pendidikan vokasi digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1. Segitiga Filsafat Pendidikan Vokasi (Rojewski, 2009)**

## 2. Landasan Yuridis

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), Pasal 1).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, Pasal 15 menyatakan, “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.” Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan (3) menyatakan, “Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.” Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, Pasal 20 ayat (3) menyatakan, “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.” Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dikenal istilah vokasional, yang dikenal adalah **pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi pada naskah ini bukan pendidikan vokasi dalam ranah perguruan tinggi atau secara yuridis, tetapi pendidikan vokasi dalam ranah teoretis dan praktis seperti definisi Unesco di atas.** Di Jerman, SMK atau pendidikan kejuruan termasuk pendidikan vokasi. Di Indonesia, SMK termasuk pendidikan menengah dan pendidikan vokasi termasuk pendidikan tinggi.

Definisi pendidikan kejuruan secara yuridis tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, Pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Definisi pendidikan kejuruan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa SMK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Pasal 19 dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya.

Definisi dan tujuan pendidikan kejuruan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN bermakna bahwa definisi dan tujuan pendidikan kejuruan terpengaruh pendapat Prosser dengan filsafat esensialismenya, sedangkan deskripsi SKL seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SPN bermakna bahwa SKL tersebut terpengaruh Dewey dengan filsafat pragmatismenya.

Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia dinyatakan:

- Pertama:
1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia; dan
  2. Menyusun kebutuhan peta tenaga kerja bagi lulusan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Kedua: Khusus kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
  - a. Membuat peta jalan pengembangan SMK;
  - b. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*);
  - c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri;
  - e. Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
  - f. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Revitalisasi SMK tersebut dilakukan demi meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia

dan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan terdidik yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri. Pendidikan vokasi tampaknya masih ditempatkan sebatas penyedia tenaga kerja (*supply*) bagi dunia usaha/industri. Arah pengembangan SMK terus-menerus mengejar gerak industri. Itu berarti pendidikan vokasi harus adaptif dengan dunia usaha/industri.

Di masa lalu (1994) ada wadah yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja yaitu Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). MPKN dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan dengan Nomor 0217/U/1994 dan 044/ SKEP/KU/VIII/94, tetapi sekarang lembaga ini tidak aktif. Pada hal Surat Keputusan Bersama tersebut juga belum dicabut.

Pendidik adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SPN, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Guru adalah pendidik profesional. Sebagai bukti formal bahwa guru SMK adalah tenaga pendidik profesional, guru perlu memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga

sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jika kualifikasi akademik guru dibuktikan dengan ijazah, maka penguasaan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi guru. Khusus untuk guru SMK diperlukan sertifikat keahlian guru produktif untuk semua paket keahlian yang ada di SMK.

Sertifikasi kompetensi guru produktif adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada guru produktif SMK yang memenuhi persyaratan. Sertifikasi kompetensi diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa tunjangan profesi bagi guru produktif SMK yang memiliki sertifikat kompetensi baik guru produktif SMK negeri maupun swasta. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

### **3. Landasan Teoretis**

Vokasi berasal dari bahasa Latin, *vocare*, yang berarti dipanggil, surat panggilan, perintah, dan undangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan (okupasi). *Vocare* dalam bahasa Inggris menjadi *vocation* sebagai kata benda (*noun*) dan *vocational* sebagai kata sifat (*adjective*). *Vocation*

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi vokasi. *Vocational* dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi vokasional atau kejuruan.

*Vocational educational* diterjemahkan menjadi pendidikan kejuruan. Di Universitas Gadjah Mada digunakan istilah sekolah vokasi. Wenrich, et al. 1988: 3 menyatakan, "*Vocational education is specialized preparation for entry into employment or advanced on the job* (Wenrich, et al. 1988: 3). Pendidikan vokasional adalah pendidikan yang disiapkan secara khusus untuk menjadi pekerja atau meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan. Pendidikan vokasional selanjutnya berkembang untuk menyiapkan profesi. Beberapa universitas mendirikan sekolah vokasi seperti kedokteran, hukum, teknik, dan pendidikan. Wenrich, et al. (1988: 3) menyatakan, "*The terms vocational education, technical education, and occupational education are used interchangeably. These terms may have different connotations for some readers. However, all these terms refer to educational for work.*" (Istilah pendidikan vokasional, pendidikan teknik, dan pendidikan okupasional digunakan secara silih berganti.

Ketiga istilah vokasional, okupasional, dan teknikal mungkin memiliki pengertian yang berbeda untuk beberapa pembaca, tetapi ketiga istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu pendidikan untuk bekerja. Di Indonesia, istilah pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, pendidikan teknik, dan pendidikan okupasi digunakan secara silih berganti. Walaupun demikian, semua istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu pendidikan untuk bekerja.

Pendidikan vokasional selanjutnya berkembang untuk menyiapkan profesi. Beberapa universitas mendirikan sekolah vokasi seperti kedokteran, hukum, teknik, dan pendidikan. Sejalan dengan dengan pendapat Wenrich, et al., Pavlova (2009: 7) menyatakan:

*Traditionally, direct preparation for work was the main goal of vocational education. It was perceived as providing specific training that was reproductive and based on teachers' intention develop understanding of a particular industry, comprising the specific skills or tricks of the trade. Students motivation was seen to be engendered by economic benefit to them, in the future. Competency-based training was chosen by most governments in Western societies as a model for vocational education.*

(Secara tradisional, disiapkan langsung untuk bekerja merupakan tujuan utam pendidikan vokasional. Pendidikan kejuruan dipahami sebagai persiapan pelatihan khusus yang dihasilkan dan berdasarkan pengalaman guru dalam mengembangkan pemahaman industri tertentu, membandingkan keterampilan spesifik dan seluk beluk perusahaan. Siswa dimotivasi bahwa dengan memiliki keterampilan akan memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka di masa yang akan datang. Pelatihan berbasis kompetensi dipilih hampir semua pemerintah di masyarakat Western sebagai suatu model pendidikan vokasional).

Selanjutnya, Billet (2011: 2) menyatakan bahwa pendidikan vokasional (*Vocational Education* atau VE) adalah, "*Educational for education.*" (Pendidikan untuk bekerja). Sejalan dengan pendapat Billet tersebut, Thompson (1973: 111) berpendapat bahwa pendidikan vokasional atau kejuruan merupakan pendidikan yang didesain untuk mengembangkan keterampilan, kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi yang dibutuhkan oleh pekerja untuk memasuki dunia usaha/industri.

Sejalan dengan pendapat Thomson, Wenrich, et al. (1988: 3) menyatakan, “*The terms vocational education, technical education, and occupational education are used interchangeably. These terms may have different connotations for some readers. However, all these terms refer to educational for work.*” (Istilah pendidikan vokasional, pendidikan teknik, dan pendidikan okupasional digunakan secara silih berganti) Di Inggris, istilah *occupational education* diterjemahkan menjadi pendidikan kejuruan.

Di Indonesia menggunakan pendidikan kejuruan untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan vokasional untuk pendidikan tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan SMK dapat digunakan secara silih berganti.

Pendidikan Teknologi Kejuruan (*Technical Vocational Education*) memiliki beberapa istilah di berbagai negara. Di Amerika Serikat digunakan istilah *Career and Technical Education* (CTE), *Vocational and Technical Education* (VTE), dan di tingkat menengah disebut *Career Centre* (CC). Di *United Kingdom* dan Afrika Selatan dikenal dengan *Further Education and Training* (FET). Di Asia Tenggara disebut *Vocational and Technical Education and Training* (VTET). Sedangkan di Australia lebih dikenal dengan *Vocational and Technical Education* (VTE) (MacKenzie dan Polvere, 2009).

Pada tanggal 26-29 April 1999 di forum *The Second International Congress on Technical Education* yang diselenggarakan di Seoul, Korea dibahas beragam penggunaan nomenklatur pendidikan vokasional yang dihadiri lebih dari 700 peserta dan 39 di antaranya adalah

menteri dan wakil Menteri Pendidikan. Kongres dilanjutkan dengan kongres kedua dengan tema *Technical and Vocational Education and Training: A Vision for the Twenty-first Century* yang dihadiri anggota Unesco dan *International Labour Organization* (ILO) serta mitra kerja. Semua peserta kongres sepakat untuk menggunakan terminologi *Technical and Vocational Education and Training* (TVET). Sejak itu, TVET dipakai secara luas. Anggota kongres yang dihadiri perwakilan Unesco, ILO, dan Unevoc bersepakat bahwa TVET termasuk **pendidikan vokasi meliputi pendidikan dan pelatihan formal, nonformal, dan informal.**

Mengingat luasnya ruang lingkup pendidikan vokasi, maka pembahasan pendidikan vokasi masa depan dibatasi pada SMK masa depan. Sekolah Menengah Kejuruan dipilih sebagai batasan telaahan dalam buku ini antara lain karena:

- (1) sesuai dengan bidang keahlian tim penulis yaitu administrasi pendidikan kejuruan;
- (2) sebagai pembina dalam menghasilkan guru SMK; dan
- (3) dalam kewenangan Kemendikbud untuk menindak-lanjuti hasil naskah tersebut.

**Tujuan SMK** adalah menghasilkan lulusan yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya. Tujuan SMK ini sesuai dengan definisi Unesco (2005) yang menyatakan, "*Technical and Vocational Education and Training (TVET) is concern with the acquisition of knowledge and skills for the word of work.*" (Pendidikan Teknikal dan Vokasional dan Pelatihan adalah berkenaan dengan penyiapan pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja.)"

Kelemahan definisi Unesco tersebut adalah tidak memasukkan sikap (*attitude*) di dalam definisinya. Pada hal sikap seseorang lebih menentukan kesuksesan di dalam kariernya dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Banyak hasil penelitian menemukan bahwa kesuksesan seseorang lebih ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya daripada kecerdasan intelektualnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka yang tujuan pendidikan kejuruan adalah menyiapkan lulusan untuk bekerja sesuai bidang keahliannya secara profesional. Tetapi dalam kenyataannya, *link and match* di SMK belum berjalan secara efektif seperti yang dinyatakan Slamet PH (2013: 16) bahwa keselarasan antara dunia SMK dan dunia usaha/industri dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu, belum terorganisasi secara formal. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tetapi wadah formal yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja belum ada.

Dua permasalahan yang awet dan krusial di SMK dari waktu ke waktu adalah tujuan yang akan dicapai dan upaya-upaya untuk mencapainya. Tujuan pendidikan kejuruan dan memilih upaya-upaya yang tepat untuk mencapainya agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja merupakan pekerjaan dinamis bagi pembuat dan pelaksana kebijakan (Slamet PH, 2013: 14).

Selanjutnya dinyatakan oleh Slamet PH (2013: 15), secara umum, tujuan pendidikan kejuruan saat ini cenderung fokus pada fungsi tunggal yaitu menyiapkan

siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai pekerja/karyawan. Tujuan ini tidak salah, namun keanekaragaman kebutuhan masyarakat menuntut SMK menjalankan fungsi majemuk. Jika fungsi majemuk yang dipilih, maka upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mencapainya harus juga majemuk. Slamet PH (2013: 15) menyatakan bahwa kebanyakan SMK saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja. Sangat sedikit SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan. Pada hal, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 30% dan yang 70% bekerja di sektor informal yang tidak pernah dipersiapkan dengan baik oleh SMK. Oleh karena itu, SMK harus menyiapkan siswanya untuk menjadi karyawan dan wirausahawan.

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bagian dari Pendidikan Kejuruan, menurut Becker, SMK merupakan lembaga pendidikan untuk menghasilkan *specific human capital* (Suyanto, 2008a: 2). Di SMK sejak awal siswa dididik untuk berkomitmen pada keterampilan tertentu (*specific*) yang *match* langsung dengan kepentingan sektor dunia usaha/industri tertentu.

**Karakteristik SMK** menurut M. Yusuf Tutoli dalam Suyanto (2008b: 50) antara lain:

- (a) SMK diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja;
- (b) SMK didasarkan atas *demand driven* atau kebutuhan dunia kerja;
- (c) Fokus isi SMK ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai

- yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
- (d) Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada *hands on* atau performa dalam dunia kerja;
  - (e) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses SMK;
  - (f) SMK yang baik harus memiliki sifat responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi;
  - (g) SMK seharusnya lebih menekankan pada *learning by doing* dan *hands on experience*;
  - (h) SMK memerlukan fasilitas mutakhir untuk kegiatan praktik,; dan
  - (i) SMK memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pada SMA, atau pendidikan umum lainnya.

Prosser & Quigley (1950: 10) menyatakan ada lima karakteristik pendidikan kejuruan sebagai berikut.

- (1) mempersiapkan siswa untuk bekerja secara lebih efisien;
- (2) memberikan pelatihan khusus dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk setiap pekerjaan tertentu;
- (3) diberikan bagi mereka yang bersiap-siap untuk model pekerjaan tertentu atau telah bekerja di urusan tersebut;
- (4) menggunakan pengalaman sebagai metode utama. Pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mengembangkan keterampilan dan dalam memikirkan kinerja dalam suatu pekerjaan, sehingga mendapatkan pemahaman dan inisiatif penuh dalam memecahkan masalah-masalah pekerjaan; dan
- (5) merupakan dasar dari konsep psikologi bahwa benak (*mind*) merupakan suatu mesin pembentuk kebiasaan yang diajarkan melalui kebiasaan praktik dari tindakan dan pemikiran untuk mencapai tujuan yang diminati oleh pembelajar.

As'ari (2007: 195-197) ada tujuh karakteristik pendidikan kejuruan, yaitu:

- (1) memiliki sifat,
- (2) justifikasi,
- (3) pengalaman belajar,
- (4) kriteria keberhasilan,
- (5) kepekaan,
- (6) bengkel kerja, dan
- (7) kerja sama.

Prosser & Quigley (1950) menyatakan:

- (1) pendidikan kejuruan akan efektif jika siswa diajar dengan materi, alat, mesin, dan tugas-tugas yang sama atau tiruan di mana siswa akan bekerja dan efisien apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan semisal replika dari lingkungan dimana mereka kelak akan bekerja, dan
- (2) latihan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional, dengan peralatan yang sama dan dengan mesin-mesin yang sama dengan yang akan dipergunakan di dalam kerjanya nanti atau jika tugas tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional dengan peralatan yang sama dan dengan mesin-mesin yang sama yang akan dipergunakan di dalam kerjanya kelak.

Karakteristik pendidikan kejuruan akan lebih kontras bila disandingkan dengan pendidikan umum. Setidaknya menurut Prosser & Quigley (1950:10) terdapat lima karakteristik yang sekaligus menjadi faktor pembeda antara

sekolah umum dengan sekolah kejuruan, sebagaimana disarikan pada tabel berikut.

**Tabel 1 Perbedaan Karakteristik Pendidikan Kejuruan dengan Pendidikan Umum**

<b>Faktor</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pendidikan</b>
Tujuan pengendalian	Mempersiapkan siswa untuk hidup secara lebih cerdas sebagai warga negara dan memahami serta menikmati hidupnya	Mempersiapkan siswa untuk bekerja secara lebih efisien
Materi yang diajarkan	Memberikan pelatihan mengenai informasi umum yang diperlukan sebagai latar belakang untuk kehidupan dan pelatihan dalam perangkat-perangkat umum pembelajaran yang diperlukan siswa untuk bekal belajar lebih lanjut mengenai kehidupan.	Memberikan pelatihan khusus dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk setiap pekerjaan tertentu
Kelompok yang dilayani	Melayani semua orang selama periode wajib belajar sampai SMA (usia 16-17 tahun), terlepas dari minat dan rencana yang bersifat kejuruan.	Diberikan bagi mereka yang bersiap-siap untuk jenis pekerjaan tertentu atau telah bekerja di bidang tersebut.

Faktor	Pendidikan	Pendidikan
Metode pengajaran dan pembelajaran	Sangat menekankan pada apa yang dapat disebut metode membaca dan mengingat kembali ( <i>reciting</i> ). Membaca untuk mendapatkan informasi dan <i>reciting</i> untuk menafsirkan serta menyimpannya di dalam ingatan.	Menggunakan pengalaman sebagai metode utama. Pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mengembangkan keterampilan dan dalam memikirkan kinerja dalam suatu pekerjaan, sehingga mendapatkan pemahaman dan inisiatif penuh dalam memecahkan masalah-masalah pekerjaan.
Psikologi fundamental	Secara umum, muatan dan metode dalam pendidikan umum muncul saat pendidik mengacu pada konsep psikologi umum mengenai kemampuan mental umum yang diyakini dapat berkembang baik dengan menguasai materi-materi tradisional yang disusun dan diajarkan sebagai disiplin ilmu formal.	Merupakan dasar dari konsep psikologi bahwa benak ( <i>mind</i> ) merupakan suatu mesin pembentuk kebiasaan yang diajarkan melalui kebiasaan praktik dari tindakan dan pemikiran untuk mencapai tujuan yang diminati oleh pembelajar.

Sumber: Prosser & Quigley (1950:10)

Karakteristik pendidikan kejuruan menurut

Djohar (2007:1295-1297) adalah sebagai berikut.

- (1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, orientasi pendidikannya tertuju pada lulusan yang dapat dipasarkan di pasar kerja.

- (2) Justifikasi pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri.
- (3) Pengalaman belajar yang disajikan melalui pendidikan kejuruan mencakup domain afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar, maupun situasi kerja yang sebenarnya.
- (4) Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari dua kriteria, yaitu keberhasilan siswa di sekolah (*in-school success*), dan keberhasilan siswa di luar sekolah (*out-of school success*). Kriteria pertama meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler, sedangkan kriteria kedua diindikasikan oleh keberhasilan atau penampilan lulusan setelah berada di dunia kerja yang sebenarnya.
- (5) Pendidikan kejuruan memiliki kepekaan/daya suai (*responsiveness*) terhadap perkembangan dunia kerja. Oleh karena itu pendidikan kejuruan harus bersifat responsif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan menekankan kepada upaya adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir anak didik dalam jangka panjang.
- (6) Bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan, untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif.
- (7) Hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan

kejuruan dengan dunia usaha dan industri merupakan suatu keharusan, seiring dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peran penting bagi pencapaian tujuan yaitu menyiapkan siswa untuk menguasai keterampilan dan sikap profesional sehingga siap memasuki lapangan kerja melalui pembentukan dan penguasaan kecakapan hidup, (Suyanto, 2008b: 50). Kecakapan hidup ini sangat diperlukan oleh siapa saja di tengah kompetisi hidup yang semakin ketat guna memperoleh keunggulan kompetitif dalam rangka mempertahankan hidup.

Siswa SMK harus dipersiapkan secara serius dalam berbagai program kejuruan dengan mempertajam kemampuan adaptif dan produktif. Namun, kemampuan ini harus sejalan dengan kompetensi yang bersifat personal maupun sosial.

Dalam proses pembangunan Pendidikan Kejuruan selama ini, terdapat benang merah yang secara konsisten dipelihara yaitu peningkatan mutu (Wardiman Djojonegoro, 1998: 18). Dalam hal ini, keinginan membangun SMK menjadi satuan pendidikan yang dapat diandalkan menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ industri. Selanjutnya (Wardiman Djojonegoro, 1998: 18) menyatakan bahwa setelah permasalahan ini dikaji secara mendalam ditemukan permasalahan yang cukup mendasar antara lain:

(1) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan

kejuruan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Depdikbud (*suplly driven*),

- (2) Para penyusun kurikulum, guru yang mengajar dan mengevaluasi hasil pengajaran, adalah orang-orang yang tidak pernah bekerja di dunia kerja dan dunia industri, sehingga tidak memahami ukuran dunia usaha/industri dan perilaku kerja dunia usaha/industri;
- (3) Program pendidikan kejuruan yang dilaksanakan sepenuhnya di SMK, cenderung berproses pendidikan demi pendidikan;
- (4) Pihak dunia usaha/industri, hanya mengeluhkan mutu tamatan SMK, tetapi tidak ikut memikirkan dan tidak membantu memecahkan masalah, karena menganggap bahwa tugas pendidikan dan pelatihan itu adalah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Untuk mengatasi permasalahan yang mendasar ini, pemerintah melalui Depdikbud (sekarang Kemendikbud) memperkenalkan kebijakan *link and match*.

#### **4. Landasan Empiris**

Perkembangan SMK saat ini (*dass sein*) dengan dengan membalikkan rasio yang semula SMA:SMK = 70:30 menjadi 70:30 selama satu decade sejak 2005 berjalan tanpa arah yang jelas. Kebijakan ini malah menyumbang angka pengangguran lulusan SMK tertinggi. Dunia pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja berjalan sendiri dalam menyiapkan bidang keahlian yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

Bidang bisnis dan manajemen menciptakan jumlah pengangur dua kali lipat daripada peluang kerja yang ada. Peluang kerja hanya tersedia 119.295 orang, sementara jumlah lulusan 348.954 orang. Menurut Kompas (18 Oktober 2016), membengkaknya jumlah lulusan sekolah menengah kejuruan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya "salah urus" dalam praksis pendidikan vokasi.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 persentase pengangguran lulusan SMK lebih rendah daripada lulusan SMA. Namun, tahun 2015, persentasenya lebih tinggi daripada lulusan SMA, begitu juga pada tahun 2016. Tingkat pengangguran lulusan SMK menjadi 9,84 persen atau 1,35 juta orang, sementara persentase pengangguran lulusan SMA turun menjadi 7,22 persen. Ada "salah urus" manajemen pendidikan vokasi. Tidak hanya di tingkat proses pendidikan yang berakibat pada pengangguran, tetapi juga di tingkat kebijakan.

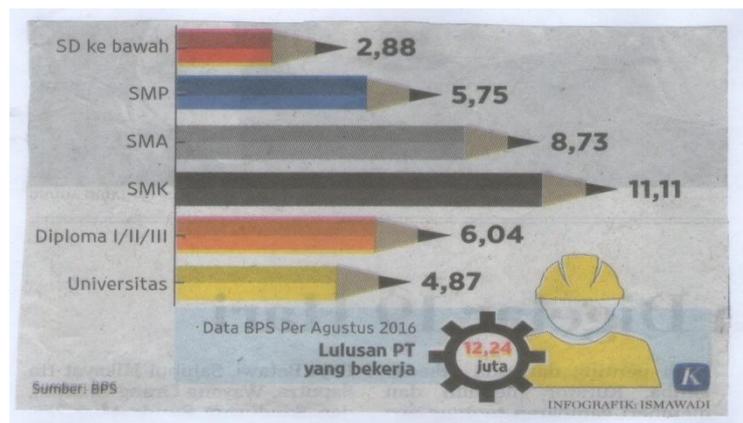
Dalam hal ini kita dukung dua dari empat tugas pokok Presiden Joko Widodo ke Mendikbud Muhadjir Effendy, pemberesan soal Kartu Indonesia Pintar dan pendidikan vokasional. Rencana peningkatan jumlah rasio SMK terhadap SMA menjadi 55:45 hingga 60:40 saat ini baru 50:50 tanpa membereskan infrastruktur di tingkat kebijakan dan pelaksanaan, kita sebut salah satu bentuk "salah urus".

Harapannya (*dass sollen*), jika mengacu pada potensi ekonomi Indonesia sejahtera, bidang pertanian membutuhkan tenaga kerja level SMK adalah 445.792 orang, sedangkan yang tersedia hanya 52.319 orang. Permintaan tenaga kerja pariwisata 707.600 orang, sedangkan yang

tersedia hanya 82.171 orang. Permintaan tenaga kerja bidang kemaritiman atau perikanan dan kelautan adalah 3,3 juta orang tetapi yang tersedia baru sekitar 17.000 orang.

Kenyataan, pemerintah membuka SMK sehingga jumlahnya menjadi 13.552 SMK sampai saat ini, sementara Malaysia menutup SMK sebanyak-banyaknya karena hanya menciptakan pengangguran. Harapannya, lulusan SMK yang tidak dibutuhkan agar dimoratorium. Pemerintah hanya membuka SMK yang benar-benar sangat dibutuhkan dunia usaha/industri. Misalnya SMK Perikanan dan Kelautan atau Kemaritiman, Pariwisata, dan Petanian.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lulusan SMK adalah lulusan pendidikan yang tertinggi tingkat penganggurannya seperti data yang tampak pada gambar berikut.



**Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan sampai Agustus 2016 (%).**

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan. Khusus untuk SMK,

perbandingan antara total lulusan SMK dengan total peluang kerja adalah seperti Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Perbandingan antara Total Lulusan SMK dengan Total Lulusan SMK dan Peluang Kerja**

<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Lulusan 2016</b>	<b>Peluang Kebutuhan Kerja</b>
Seni Pertunjukan	2.000	6.300
Seni Rupa dan Kriya	10.017	81.813
Pariwisata	82.171	707.600
<b>Bisnis dan Manajemen</b>	<b>348.954</b>	<b>119.225</b>
Perikanan dan Kelautan	17.249	3.364.297
Agribisnis dan Agroteknologi	52.319	445.792
Kesehatan	60.944	68.245
Teknologi Informasi dan Komunikasi	277.545	327.813
Teknologi dan Rekayasa	445.097	638.652

(Kompas, 18 Oktober 2016: 1)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2014; persentasi pengangguran lulusan SMK sebesar 7,21 persen; masih lebih rendah dibandingkan dengan pengangguran lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,19 persen. Tetapi, pada Februari 2015, terjadi sebaliknya yakni persentasi pengangguran SMK sebesar 9,05 persen; lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran lulusan SMA sebesar 7,5 persen. Demikian pula Februari 2016, persentase pengangguran lulusan SMK meningkat menjadi 9,84 persen atau 1,35 juta orang, sedangkan pengangguran lulusan SMA menurun menjadi 7,22 persen atau 1,1 juta orang. Data ini merupakan tantangan besar bagi pembuat kebijakan pendidikan yang saat ini sedang gencar-gencarnya berupaya untuk menambah jumlah SMK.

Jika jumlah SMK ditambah, sedangkan tingkat pengangguran lulusan SMK semakin bertambah, maka penambahan SMK hanya akan menjadi “pencetak penganggur” (Kompas, 17 Oktober 2016: 15).

Berkenaan dengan pengangguran lulusan SMK, Bagong Suyanto (2016) menyatakan bahwa di kalangan masyarakat kini, ada indikasi terjadi krisis kepercayaan pada arti pentingnya SMK, dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi jika lulusan SMK yang dengan dengan menghabiskan tabungan orang tuanya untuk membiayai pendidikan anaknya, namun setelah lulus hanya menambah banyaknya pengangguran. Di sejumlah daerah bukan rahasia lagi, banyak orang tua yang sudah menghabiskan tabungannya menyelesaikan sekolah anaknya di SMK ternyata setelah lulus hanya menjadi penganggur. Selanjutnya, menurut Bagong Suyanto (2016), dengan dukungan dana dan fasilitas yang serba sangat terbatas selama ini menyebabkan tidak banyak SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi seperti yang diharapkan dunia usaha/industri.

Dengan jumlah 13.552 SMK saat ini, 10.084 di antaranya swasta, menunjukkan pendidikan vokasi berstatus “kelas dua”. Dengan sikap mengisi apa yang belum/tidak dicukupi pemerintah, swasta sekadar pelengkap. Serba swasta pun dianggap bukan mitra sekolah negeri, lantas dihapus persyaratan lulusan SMK tak harus masuk dunia kerja minimal dua tahun sebelum masuk perguruan tinggi. Mengatasi dengan memperbanyak SMK swasta dan SMK

negeri, dampak negatifnya sudah terlihat. Untuk membongkar kebijakan "salah urus", perlu dibongkar pola pikir, bahwa penambahan jumlah SMK bukanlah solusi pamungkas tanpa diikuti sejumlah persyaratan.

Harapannya, syarat itu tidak hanya keputusan penambahan *unit cost* peserta didik SMK, idealnya dua kali SMA, berikut turunannya seperti biaya pemagangan dan pengadaan guru, tetapi juga kerja sama sinergis dengan dunia usaha/industri. Tanpa itu, SMK hanya menghasilkan lulusan serba tanggung. Tanggung masuk perguruan tinggi, tanggung pula masuk dunia usaha/industri.

Harapannya, perlu dikembangkan desain ideal pendidikan vokasi agar menjadi alternatif bagi mereka yang memilih langsung bekerja. Perubahan pola pikir menyangkut tiga bentuk pendidikan vokasi saat ini terdiri atas tiga bentuk kelembagaan formal dan nonformal, meliputi SMK, politeknik, akademi komunitas, dan balai latihan kerja. Tanpa kerja sama sinergis yang diawali perubahan pola pikir akan eksistensi pendidikan vokasi, yang terjadi hanya memperbanyak penganggur lulusan SMK.

Harapan lainnya, perlu kerja sama antara Kemdikbud dengan 12 Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan 34 Gubernur se-Indonesia bahkan pengguna lainnya adalah syarat mutlak. Mereka bekerja sama secara sinerjis untuk memprediksi berapa jumlah tenaga kerja level SMK yang sebenarnya dibutuhkan dunia usaha/industri berdasarkan bidang keahlian tertentu.

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai status kelas dua mendukung pernyataan Kompas (23 Mei 2016: 6):

Pendidikan kejuruan atau vokasi di jenjang menengah-tinggi saat ini masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Padahal, harapannya lulusan pendidikan vokasi yang siap kerja berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menghadapi tantangan citra sebagai "pendidikan kelas dua", vokasi di Indonesia juga masih perlu diperkuat untuk relevansi kompetensi yang dihasilkan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, penguatan pendidikan vokasi harus menjadi fokus dan perhatian semua pihak.

SMK sebagai kelas dua karena dianggap sebagai buangan tidak lulus ujian masuk SMA; bekerja dengan otot adalah hina, sedangkan bekerja dengan otak adalah mulia; lulusan SMK lebih unggul dibandingkan dengan lulusan SMA setelah sama-sama bekerja di dunia usaha/industri akibatnya dunia usaha/industri lebih senang menerima lulusan SMA daripada SMK; bekerja di belakang meja lebih bergengsi daripada bekerja di bengkel. Kenyataan di lapangan selama ini membuktikan bahwa lulusan SMK, selalu kalah bersaing dengan lulusan SMA dalam mendapatkan pekerjaan. Bertambahnya jumlah lulusan SMK dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya "salah urus" dalam praksis pendidikan vokasi.

Menurut Kompas (18 Oktober 2016: 6), "Dengan jumlah SMK sebanyak itu, menunjukkan bahwa SMK berstatus "kelas dua." Sebagian masyarakat masih mengaggap menyekolahkan anaknya ke SMA lebih bergengsi daripada ke SMK karena lulusan SMA kelak dapat menjadi pegawai berdasi, duduk manis di belakang meja dengan ruang kerja yang bersih, indah, ber-AC disertai gaji yang

relatif tinggi. Sebaliknya, lulusan SMK kelak hanya menjadi buruh dengan pakaian kerja yang kumuh, bekerja di bengkel dengan ruang yang berminyak, berdebu, bising dari suara mesin, jarang ber-AC disertai gaji yang relatif rendah sebagai tukang. Idealnya, bengkel selalu bersih, jika perlu diberi AC dengan gaji yang memadai. Harapannya, lulusan SMA dan SMK sama pentingnya dan sama-sama mulia karena saling melengkapi.

Amich Al-humaini (2016: 13) menyatakan bahwa debat mengenai signifikansi pendidikan vokasi dalam upaya meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi penduduk usia muda produktif sudah berlangsung bilangan dekade. Pendidikan vokasi menjadi isu penting dalam wacana publik di berbagai belahan dunia. Merujuk banyak literatur ekonomi pendidikan, pokok perdebatan berpangkal pada pemikiran pragmatis dalam pembangunan ekonomi.

Banyak ahli berpendapat bahwa untuk meningkatkan produktivitas (kuantitas banyak, mutu tinggi, efektif, dan efisien) kerja bangsa diperlukan pasokan tenaga kerja profesional yang bekerja di sektor-sektor utama penggerak perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pendidikan vokasi harapannya menjadi pilihan utama dan praktis untuk membekali penduduk usia muda produktif tentang pengetahuan-bagaimana (*know-how*), yaitu suatu kemahiran teknis yang diperlukan di dunia usaha/industri. Terdapat tiga pertanyaan penting yaitu:

- (1) apakah pendidikan vokasi merupakan instrumen efektif untuk meningkatkan keterampilan teknikal tenaga kerja?;

- (2) bagaimana rancangan ideal pendidikan vokasi supaya dapat menjadi alternatif bagi yang lebih memilih langsung bekerja dan tidak ingin melanjutkan pendidikan akademik di perguruan tinggi?; dan
- (3) apakah pendidikan vokasi berperan secara bermakna (signifikan) untuk mengurangi pengangguran?

Kunjungan Presiden Republik Indonesia akhir-akhir ini ke Jerman ingin mengembangkan pendidikan kejuruan seperti di Jerman. Pendidikan Kejuruan di Jerman fokus pada pengembangan keterampilan. Presiden Republik Indonesia ingin menerapkan pengembangan keterampilan pada generasi muda sebagai salah satu acuan *master plan* pendidikan ke depan, hal ini dikarenakan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia merasa kekurangan tenaga kerja terampil (<http://www.voaindonesia.com/a/kerjasama-pendidikan-dan-ekonomi-fokus-kunjungan-jokowi-ke-jerman/3291766.html>). Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ingin meniru negara-negara maju untuk menyiapkan tenaga kerja berdaya saing tinggi di era global. Penguatan pendidikan kejuruan kini menjadi prioritas. Targetnya tak hanya mencetak tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan dengan perekonomian Indonesia yang diprediksi menempati posisi ketujuh terbesar di dunia pada 2030 Kompas, 26 Desember 2016: 6). Oleh karena itu, ke depan pendidikan generasi muda akan lebih banyak diarahkan ke pencetakan tenaga terampil, dibandingkan sarjana yang akhirnya menganggur dari pada bekerja secara

profesional. Indonesia perlu meningkatkan daya saing tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari MEA yang akan membanjiri negara kita untuk bekerja. Jika tenaga kerja kita kalah bersaing, maka tenaga kerja kita tidak diterima bekerja di luar dan di dalam negeri sehingga bangsa hanya menjadi penonton atau penganggur dan walaupun diterima sebagai pekerja tetapi hanya sebagai tenaga kasar atau kuli di negeri sendiri.

Berikut sejumlah isu utama SMK yang sudah bertahun-tahun menjadi penyakit kronis SMK.

- (1) Kemampuan akademik peserta didik SMK tidak sebaik peserta didik SMA yang dibuktikan hasil ujian nasional. Peserta didik SMK, dengan rata-rata nilai lebih rendah dibandingkan SMA. Data 2014/2015 menunjukkan, perbedaan nilai ujian untuk tiga mata pelajaran pokok sangat mencolok, yaitu: (i) Matematika 48,24 (SMK), 59,72 (SMA-IPA), 56,06 (SMA-IPS); (ii) Bahasa Indonesia 65,45 (SMK), 75,57 (SMA-IPA), 67,48 (SMA-IPS); dan (iii) Bahasa Inggris 55,30 (SMK), 66,34 (SMA-IPA), 59,09 (SMA-IPS). Fakta ini pula yang menjelaskan mengapa persentase lulusan SMK lebih sedikit diterima di perguruan tinggi, yang mensyaratkan kemampuan akademik tinggi. Pada 1990 capaian akademik siswa SMK tertinggal 2,6 poin dari murid SMA, dan jarak ketertinggalan mereka kian menjauh jadi 6,9 poin pada 2000. Sampai saat ini, kondisi SMK tetap sama, mengingat tak ada ikhtiar peningkatan mutu dan upaya perbaikan tata kelola yang cukup berarti. Sebenarnya ini bukan gejala khas Indonesia, tetapi sudah jadi fenomena

umum di banyak negara di dunia, sebagaimana dikonfirmasi melalui studi-studi yang dilakukan oleh banyak ahli ekonomi pendidikan (George Psacharopoulos 1997; Shyamal Majumdar 2009 & 2011; Jorgen Billetoft 2011 dalam Amich Al-humaini. (2016: 13). Harapannya, kemampuan SMK perlu ditambah kognitifnya agar setara dengan SMA.

- (2) Pendidikan vokasi di SMK kurang memadai karena kurang didukung sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan yang di bawah standar sehingga berdampak pada kualitas lulusan. Tak heran, lulusan SMK juga dipersepsi kurang baik oleh para pemberi kerja, yang diukur melalui kinerja di tempat kerja. Hasil studi Bank Dunia, *Skills for the Labor Market in Indonesia* (2012), menunjukkan, tingkat kepuasan pemberi kerja terhadap lulusan SMK tergolong rendah. Beberapa aspek penting yang dianggap menjadi kelemahan mendasar SMK, yang menyebabkan kualitas lulusannya tidak sebaik mutu lulusan SMA, adalah: (i) ketersediaan fasilitas pendidikan (29 persen); (ii) kualitas pengajaran dan proses pembelajaran (23 persen); (iii) keterampilan khusus (13 persen); (iv) kurikulum (9 persen); dan (v) relevansi (8 persen). Harapannya, SMK harus memenuhi delapan standar pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah agar dihasilkan lulusan yang bermutu tinggi.
- (3) Keterampilan dan keahlian seharusnya menjadi keunggulan pendidikan vokasi di SMK. Tetapi dalam kenyataannya, disain kurikulum dan program studi yang mencerminkan kekuatan kedua hal tersebut justru belum

relevan dengan kebutuhan keterampilan dan keahlian dunia usaha/industri. Menurut Menteri Prindustri (18 Desember 2016: 6), “Mayoritas SMK belum berbasis industri, tetapi masih berupa teori di kelas.” Oleh sebab itu, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK justru lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA, masing-masing 9,1 persen dan 8,2 persen (Sakernas-BPS 2015). Selain itu, industri juga lebih menyukai lulusan SMA karena dianggap lebih mumpuni dalam hal *cognitive skills*, meskipun mereka pada mulanya belum memiliki keterampilan khusus dan keahlian teknis. Dengan *cognitive skills* lebih tinggi, lulusan SMA justru lebih mampu beradaptasi dengan mudah dan cepat di dunia usaha/industri. Harapannya, lulusan SMK dibekali kemampuan kognitif agar seara dengan lulusan SMA.

Dunia usaha/industri mengetahui bahwa lulusan SMA lebih mudah dan lebih cepat menyerap hasil pelatihan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/industri daripada lulusan SMK. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Satrio Soemantri Brojonegoro (2015) terhadap 460 perusahaan tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan beragam bidang usaha dan beragam ukuran yang menemukan bahwa: (1) separuh populasi lulusan SMK tidak memperoleh pekerjaan formal, artinya terjadi ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di SMK dan harapan serta kebutuhan perusahaan; dan (2) dunia usaha/industri lebih memilih lulusan sekolah menengah atas (SMA) dari pada lulusan SMK. Perusahaan lebih memilih mereka yang siap latih karena dinamika

pekerjaan yang demikian cepat dalam era persaingan global sehingga diperlukan calon pekerja yang adaptif mampu mengikuti perkembangan (Haidar Banjar, 2016).

Pembaruan kurikulum harus memuat tiga hal esensial yang terkait langsung dengan proses pembelajaran, yaitu:

- (1) penguatan mata pelajaran pokok (Matematika, sains, bahasa);
- (2) peningkatan kecerdasan kognitif (berpikir kritis, daya analisis); dan
- (3) peningkatan kecakapan sosial (komunikasi, kepemimpinan dan organisasi, penyelesaian masalah, kerja kelompok).

Pendidikan vokasi punya nilai ekonomi yang tinggi bila lulusannya terserap di dunia usaha/industri.

*Link and match* di SMK belum berjalan secara efektif seperti yang dinyatakan Slamet PH (2013:16) bahwa keselarasan antara dunia SMK dan dunia usaha/industry dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu, belum terorganisasi secara formal. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tetapi wadah formal yang menjembatani dunia SMK dan dunia usaha/industri belum ada. Di masa lalu (1994) ada wadah yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja yaitu Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). MPKN dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan dengan Nomor 0217/U/1994 dan 044/ SKEP/KU/VIII/94, tetapi

sekarang Lembaga ini tidak aktif. Padahal Surat Keputusan Bersama tersebut juga belum dicabut.

Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengikat agar dunia usaha/industri berkewajiban bekerja sama dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus bekerja sama secara sinerjis dengan dunia usaha/industri agar kompetensi lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan kompetensi di dunia usaha/industri. Dunia usaha/industri bersedia menyiapkan tempat Praktik Kerja Industri (Prakerin)/magang bagi peserta didik/guru vokasi, membimbing dan mendampingi peserta didik membuat rencana bisnis dan menerapkan rencana tersebut sampai berhasil atau menjadi pembimbing dan pendamping inkubator bisnis agar lulusan dapat menjadi wirausahawan sukses, dan menyerap lulusan pendidikan vokasi. “Dunia industri/usaha kian bertaut, dari dulu sampai sekarang hanya wacana” (Kompas, 19 Desember 2016: 6). Harapannya, ada dasar hukum yang mewajibkan dunia usaha/industri wajib bekerja sama dengan SMK disertai sanksi yang tegas. Membentuk badan Musyawarah Pendidikan Kejuruan (MPK) yang beranggotakan orang-orang yang relevan, profesional, dan berkomitmen tinggi.

Masalahnya adalah bagaimana bila terjadi krisis moneter dan dunia usaha/industri banyak yang bangkrut sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat menyebabkan bertambahnya pengangguran lulusan SMK. Bagaimana bangsa Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain bila rakyatnya terus-menerus dididik menjadi bangsa tukang? Jika pola

pikir pemerintah masih cenderung konservatif dalam upaya pengembangan SMK, sukar diharapkan bangsa Indonesia akan berubah secara signifikan dalam mencapai cita-cita untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, sudah waktunya SMK di Indonesia tidak lagi terus-menerus menjadi pencari kerja di dunia usaha/industri, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja yang menggerakkan arah industri.

Pendidikan vokasi di SMK kekurangan guru produktif sehingga banyak guru SMK yang mengajar yang tidak sesuai bidang keahlian. Akibatnya, proses dan hasil belajar siswa belum bermutu. LPTK belum mampu memenuhi permintaan SMK untuk mendidik guru-guru produktif yang berkualitas. Harapannya, perlu ada alih fungsi guru normative menjadi guru produktif.

Kebutuhan pendidik (guru) tetap SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 550.604 (Kompas, 21 November 2016; 15). Khusus untuk SMK masih membutuhkan guru produktif. 91.861 (Kompas, 20 Oktober 2016: 11). “Hampir 70% guru SMK kita adalah guru normatif, bukan guru yang memiliki kemampuan memberikan pelatihan (produktif)” kata Presiden Joko Widodo (Kompas, 2 Desember 2016: 12). Akibat SMK kekurangan guru produktif, maka mata pelajaran praktik diajar oleh guru yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Dampaknya adalah mutu proses dan hasil belajar praktik siswa menjadi rendah. Kualitas guru merupakan faktor dominan yang menentukan proses dan hasil belajar siswa. Peran guru sangat vital dan sangat menentukan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Data

kualitas guru menunjukkan bahwa **24,3% guru belum memiliki kualifikasi akademik dan 47,7% guru belum memiliki sertifikasi guru** (Subandi Sarjoko, 2016). Menurut Hartarto (Kompas, 18 Desember 2016: 6), 22% guru SMK ternyata tidak menguasai keterampilan yang diajarkan.

Sertifikasi guru ternyata hanya meningkatkan kesejahteraan guru belum meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selama ini, SMK memberikan sertifikat kompetensi kepada setiap lulusannya karena salah satu persyaratan dunia kerja adalah memiliki sertifikat kompetensi. Sementara, guru yang memfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi lulusannya belum memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya.

Secara umum guru SMK produktif belum memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang (BNSP) (Kompas, 14 Desember 2016: 11). Untuk mengantisipasi tuntutan dunia kerja dan *stakeholders* terhadap pentingnya guru produktif SMK memiliki sertifikat kompetensi, Kualitas pembelajaran di kelas tidak hanya tergantung kualitas guru tetapi juga kualitas kepala dan pengawas sekolah (Kompas, 2011: 15, Anonim, 2012, dan Hoy & Miskel, 2013). Harapannya, semua guru produktif memiliki sertifikasi keahlian sesuai bidang keahlian masing-masing.

Berdasarkan hasil uji kompetensi 163.333 kepala sekolah ternyata semuanya di bawah 50 dari nilai ideal 100. Nilai kompetensi manajerial 48,87, kewirausahaan 48,52. Usaha pengembangan sekolah 47,67, kepemimpinan pembelajaran 43,96 dan yang terendah supervisi 36,45

(Kompas, 2015b: 15 & Data Direktorat Tenaga Kependidikan, 2015). Kepala dan pengawas sekolah cenderung fokus pada administrasi guru bukan pada perbaikan mengajar guru pada saat menilai kinerja guru. Banyak kepala dan pengawas sekolah tidak mampu memberi saran pedagogi kepada guru (Anonim, 2015). Penilaian kinerja guru oleh kepala dan pengawas sekolah tidak objektif dan cenderung sangat tinggi semua (Kompas, 2015: 15b). Harapannya, kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki kemampuan supervisi akademik dan manajerial yang memadai.

Data dari Direktorat Pembinaan Guru Dikmen (2015) menemukan bahwa Penilaian Kinerja Guru (PKG) 95% guru oleh kepala dan pengawas sekolah dinilai amat baik bahkan ada satu sekolah amat baik semua. Temuan ini bertolak belakang dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Guru Dikmen (2015) yang menemukan hanya 5% yang amat baik. Selain itu, guru, kepala dan pengawas sekolah se-Indonesia sangat disibukkan oleh tugas-tugas administratif. Harapannya, kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki kemampuan menilai kinerja guru secara objektif.

Berdasarkan Laporan Hasil Temuan Studi Dasar tentang Kompetensi Kepala dan Pengawas Sekolah oleh *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* ditemukan bahwa kepala dan pengawas sekolah lemah dalam kompetensi supervisi, pada hal kompetensi tersebut sangat penting untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Selain itu, mereka rendah kemampuannya dalam menggunakan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) untuk administrasi/manajemen sekolah dan pembelajaran. Kepala dan pengawas sekolah lebih cenderung melakukan supervisi administratif daripada akademik (Kompas, 2015a: 11; Data Direktorat Tenaga Kependidikan, 2015; dan Kompas, 14 Desember 2016: 11). Harapannya, kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki kemampuan supervisi akademik dan ICT yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka **isu-isu** (belum tentu benar dan perlu penelitian) SMK yang dicarikan solusinya antara lain adalah:

- (1) pemetaan pengembangan SMK mutakhir belum mantap;
- (2) luar negeri terutama Malaysia mengurangi bahkan menutup SMK, Indonesia malah sebaliknya;
- (3) pengembangan SMK dengan menambah SMK hanya menambah jumlah: pengangguran, pengeluaran keuangan negara, guru produktif, dan fasilitas bengkel/laboratorium;
- (4) pengangguran terdidik tertinggi adalah SMK;
- (5) SMK adalah “sekolah kelas dua.”
- (6) orang tua/masyarakat lebih bangga anaknya masuk SMA daripada SMK;
- (7) lulusan SMA menjadi PNS duduk manis di belakang meja dengan baju bersih, sedangkan lulusan SMK menjadi kuli di bengkel pakain kerja yang relative kotor;
- (8) dunia usaha/industri lebih senang menerima lulusan SMA daripada SMK;
- (9) lulusan SMK hanya menjadi pencari kerja bukan pencipta lapangan kerja;

- (10) untuk apa saja waktu sekolah di SMK tiga tahun setelah lulus hanya mendapat satu sertifikat keahlian saja;
- (11) kompetensi lulusan SMK belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/industri;
- (12) *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri belum berjalan efektif sejak dulu sampai sekarang hanya wacana;
- (13) SMK kesulitan mencari tempat prakerin/magang yang memenuhi syarat;
- (14) dunia usaha/industri merasa kemitraan SMK dengannya hanya merepotkan saja, takut ada mesin/alat rusak dan bahan praktik yang terbuang;
- (15) dunia usaha/industri mengeluhkan disiplin dan budaya kerja peserta prakerin/magang relatif rendah;
- (16) dunia usaha/industri mengeluhkan apa yang didapat peserta didik kalau prakerin/magang hanya tiga bulan terlebih-lebih di proyek bangunan yang selesainya relatif lama (kasus prakerin/magang di proyek besar, baru sampai pasang pondasi, prakerin/magang sudah selesai);
- (17) sekolah kurang proaktif mencari mitra dengan dunia usaha/industri;
- (18) belum ada dasar hukum yang mewajibkan dunia usaha/industri harus bermitra dengan SMK;
- (19) Indonesia mau meniru Jerman, pada hal Indonesia berbeda dengan Jerman;
- (20) masih banyak SMK sastra (tanpa praktik bengkel) terutama SMK swasta;
- (21) SMK merekayasa evaluasi mandiri untuk mendapat akreditasi A;

- (22) asesor BANSM cenderung memberi akreditasi A kepada SMK (tidak objektif);
- (23) lebih 50% SMK belum terakreditasi A;
- (24) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) belum berjalan sebagaimana mestinya;
- (25) SMK swasta lebih senang menerima guru lulusan non-LPTK daripada lulusan LPTK;
- (26) SMK kekurangan guru produktif sehingga peserta didik dilatih oleh guru yang bukan ahlinya;
- (27) mata pelajaran kewirausahaan diajar oleh guru yang belum pernah sukses berwirausaha dan lebih banyak berteori;
- (28) sertifikasi guru baru meningkatkan kesejahteraan guru belum meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan;
- (29) sebagian besar guru SMK belum bersertifikat guru produktif, sedangkan peserta didik yang diluluskannya wajib memiliki sertifikat keahlian;
- (30) kompetensi kepemimpinan Kepala SMK masih relatif rendah;
- (31) Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMK hampir semua guru SMK dinilai relatif sangat tinggi oleh kepala dan pengawas sekolahnya; sebaliknya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) oleh Kemendikbud relatif sangat rendah;
- (32) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) SMK oleh pengawas sekolahnya hampir semua relatif sangat tinggi (tidak objektif); sebaliknya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) oleh Kemendikbud relatif sangat rendah (objektif);

- (33) Kepala SMK sangat sibuk mengelola sekolahnya sehingga tidak mengajar dan mengajarnya diserahkan guru lain; dan
- (34) Semakin hebat Kepala SMK, semakin jarang berada di sekolah karena diundang sebagai nara sumber/instruktur, tim penilai, dan sebagainya.
- (35) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sangat disibukkan oleh urusan administratif daripada akademik.

Salah satu permasalahan yang dihadapi SMK adalah rendahnya mutu lulusan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu lulusan. Misalnya, membuat standar pendidikan nasional; mengubah Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013; melaksanakan program S1; membimtekkan/melatih guru, kepala dan pengawas sekolah; melaksanakan program guru, kepala dan pengawas sekolah pembelajar; membantu biaya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); membiayai pembentukan Kelompok Kerja Kepala dan Pengawas Sekolah; membantu membiayai pembentukan Musyawarah Kerja Kepala dan Penawas Sekolah; melaksanakan PKG dan UKG; mensertifikasi guru; memberi tunjangan profesi guru; melaksanakan program alih fungsi guru; melaksanakan lomba guru, kepala dan pengawas sekolah berprestasi; melaksanakan lomba tenaga administrasi sekolah berprestasi; lomba inovasi belajar; lomba pendidikan karakter bangsa; lomba Uji Kompetensi Guru Produktif SMK; lomba simposium guru; melengkapi sarana dan prasarana sekolah; memberi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan melaksanakan program

kemitraan sekolah maju (sekolah pengimbas) dengan sekolah terdepan, terluar, dan terpencil (sekolah imbas); dan melaksanakan akreditasi sekolah. Tetapi, mutu lulusan SMK belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian SMK terutama di kota-kota besar telah menunjukkan peningkatan mutu lulusan yang cukup menggembirakan. Sebaliknya, sebagian besar lainnya masih memprihatinkan (Anonim, 2007: 1).

Berdasarkan kenyataan ini, berbagai pihak mempertanyakan, “Apa yang salah dengan penyelenggaraan SMK?”, “Apakah SMK salah urus?” Dari berbagai pengamatan minimal ada enam faktor yang menyebabkan mutu lulusan SMK tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu: belum adanya konsep yang jelas tentang:

- (1) pengembangan SMK masa depan;
- (2) kompetensi lulusan SMK masa depan;
- (3) *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri;
- (4) kompetensi guru SMK masa depan;
- (5) sertifikasi guru SMK; dan
- (6) kepemimpinan dan peranan Kepala SMK masa depan.

## **B. Tujuan**

Tujuan penulisan naskah ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep kebijakan:

- (1) pengembangan SMK masa depan;
- (2) kompetensi lulusan SMK masa depan;
- (3) *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri;
- (4) kompetensi guru SMK masa depan;

- (5) sertifikasi guru SMK; dan
- (6) kepemimpinan dan peranan Kepala SMK masa depan.

### **C. Output dan Manfaat**

#### **1. Output**

Tersedianya kajian akademik tentang konsep kebijakan:

- (1) pengembangan SMK masa depan;
- (2) kompetensi lulusan SMK masa depan;
- (3) *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri;
- (4) kompetensi guru SMK masa depan;
- (5) sertifikasi guru SMK; dan
- (6) kepemimpinan dan peranan Kepala SMK masa depan.

#### **2. Manfaat**

Hasil kajian naskah ini diharapkan dapat dimanfaatkan pembuatan kebijakan di lingkungan Kemendikbud sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan tentang:

- (1) pengembangan SMK masa depan;
- (2) peningkatan kompetensi lulusan SMK masa depan;
- (3) peningkatan *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri;
- (4) peningkatan kompetensi guru SMK masa depan;
- (5) peningkatan sertifikasi guru SMK; dan
- (6) peningkatan kepemimpinan dan peranan Kepala SMK masa depan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teoretis dan Hasil Penelitian**

Kajian teoretis dan hasil penelitian ini disajikan dengan maksud sebagai “pisau analisis” dalam melaksanakan pembahasan.

##### **1. Pengembangan SMK Masa Depan**

Teori utama yang digunakan dalam pengembangan pendidikan vokasi adalah teori efisiensi sosial Prosser dan teori pendidikan demokratis Dewey. Teori Prosser terkenal dengan sebutan Prosser's *sixteen theorems*. Keenam belas teori Prosser tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) *Vocational education will be efficient proportion as environment in which the learner is trained is a replica of the environment in which he must subsequently (work environment).*
- (2) *Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way, with the same operations, the same tools, and the same machines as in the occupation itself (learning facilities).*
- (3) *Vocational education will be effective in proportion as it trains the individual directly and specifically in the thinking habits and the manipulative habits required in the occupation itself (work habits).*
- (4) *Vocational education will be effective in proportion as it enables each individual to capitalize on his interests, aptitudes, and intrinsic intelligence to the highest degree (individual need).*
- (5) *Effective vocational education for any profession, trade, occupation, or job can only be given to the selected group of individuals who need it, want it, and are able to profit by it (elective).*
- (6) *Vocational training will be effective in proportion as the specific training experiences for forming right habits of doing and thinking are repeated to the point that these habits*

- become fixed to the degree necessary for gainful employment (gainful employment).*
- (7) *Vocational education will be effective in proportion as the instructor has had successful experiences in the application of skills and knowledge to the operations and processes he undertakes to teach (crafts person teacher).*
  - (8) *For every occupation here is a minimum of productive ability which an individual must possess in order to secure or retain employment in that occupation standards).*
  - (9) *Vocational education must recognize conditions as they are and must train individuals to meet the demands of the "market" even though it may be true that more efficient ways for conducting the occupation may be known and better working conditions are highly desirable (industry need).*
  - (10) *The effective establishment of process habits in any learner will be secured in proportion as the training is given on actual jobs and not on exercises or pseudo jobs (actual jobs),*
  - (11) *The only occupation there is a body of content which is peculiar to that occupation is in the experiences of masters of that occupation (content from occupation).*
  - (12) *For every occupation there is a body of content which is peculiar to that occupation and which practically has no functioning value in any other occupation (specific job training).*
  - (13) *Vocational education will render efficient social services in proportion as it meets the specific training needs of any group at the time that they need it and in such a way that they can most effectively profit by the instruction (group needs).*
  - (14) *Vocational education will be socially efficient in proportion as in its methods of instruction and its personal relations with learners it takes into consideration the particular characteristics of any particular group which it serves (methods of instruction).*
  - (15) *The administration of vocational education will be efficient in proportion as it is elastic and fluid rather than rigid and standardized (elastic administration).*
  - (16) *While every reasonable effort should be made to reduce per capita cost, there is a minimum level below which effective vocational education can not be given, and if the*

*course does not permit this minimum of per capita cost, vocational education should not be attempted.*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

- (1) Pendidikan kejuruan akan efektif jika peserta didik diajar dengan materi, alat, mesin, dan tugas-tugas yang sama atau tiruan di mana peserta didik akan bekerja. Lebih efektif dan efisien lagi apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan aslinya, misalnya replika dari lingkungan dimana mereka kelak akan bekerja.
- (2) Latihan kejuruan yang efektif jika tugas-tugas yang di dalam latihan memiliki kesamaan operasional, dengan peralatan dan dengan mesin-mesin yang sama dengan yang akan dipergunakan di dalam kerjanya nanti, atau jika tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional dengan peralatan dan mesin-mesin yang sama, yang akan dipergunakan di dalam kerjanya kelak.
- (3) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila latihan diberikan secara langsung dan spesifik di dalam pemikiran, perhatian, minat, dan intelegensi intrinsik, dengan kemungkinan pengembangan terbesar dengan memberikan kondisi yang menunjang pengembangan agar potensi yang ada dapat lebih aktual, atau jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
- (4) Pendidikan kejuruan akan efektif jika sejak latihan sudah dibiasakan dengan perilaku yang akan ditunjukkan dalam pekerjaannya kelak atau dapat mengarahkan minat setiap individu, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang lebih tinggi.
- (5) Pemberian latihan kejuruan yang efektif untuk semua profesi, perdagangan, pekerjaan, hanya dapat diberikan kepada kelompok terpilih yang memerlukan, menginginkan dan sanggup memanfaatkannya, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut.
- (6) Latihan pendidikan kejuruan akan efektif apabila pemberian latihan yang berupa pengalaman khusus dapat terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan yang benar dalam bertindak dan berpikir, secara berulang-ulang hingga

diperoleh penguasaan yang tepat dalam pengerjaannya, atau jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar di ulangkan sehingga pas seperti yang di perlukan dalam pekerjaannya nanti.

- (7) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila pelatihnya cukup berpengalaman dan menerapkan kemampuan dan keterampilannya di dalam hubungan masyarakat, atau jika pelatihnya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilaksanakan.
- (8) Setiap pekerjaan selalu ada batas minimum kemampuan yang harus dimiliki oleh individu agar bisa menjabat pekerjaan itu. Jika pendidikan tidak diarahkan pada pencapaian persyaratan minimal tersebut maka tentu individu akan merasakan kerugian, demikian pula masyarakat atau pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia dapat bekerja pada jabatan tersebut.
- (9) Pendidikan kejuruan harus mengenal kondisi kerja dan harus memenuhi harapan “pasar” atau harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja).
- (10) Proses pemantapan yang efektif tentang kebiasaan bagi setiap peserta didik akan tergantung dari proporsi sebagaimana latihan memberikan kesempatan untuk mengenal pekerjaan yang sesungguhnya, dan bukan hanya tiruannya atau proses pembinaan, kebiasaan yang efektif pada peserta latihan akan tercapai jika pelatihan diberikan kepada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).
- (11) Sumber data yang paling tepat untuk menentukan materi pendidikan kejuruan tidak ada lain kecuali pengalaman langsung yang erat kaitannya dengan pekerjaan. Dengan kata lain sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli pada okupasi tersebut.
- (12) Setiap jabatan tentu ada bagian inti yang merupakan bagian yang sangat penting, dan ada bagian lain yang bisa cocok dengan pekerjaan/jabatan lain, atau setiap okupasi mempunyai cirri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

- (13) Pendidikan kejuruan akan dirasakan efisien sebagai penyiapan pelayanan bagi masyarakat untuk kebutuhan tertentu pada waktu tertentu, atau akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan.
- (14) Pendidikan kejuruan dirasakan bermanfaat secara sosial apabila hubungan manusiawinya diperhatikan, atau jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta pelatihan mempertimbangkan sifat-sifat peserta tersebut.
- (15) Administrasi pendidikan kejuruan akan dikatakan efisien apabila ia bersifat lentur (fleksibel) dibandingkan dengan yang kaku, atau lues dan mengalir daripada kaku dan terstandar.
- (16) Walaupun untuk sesuatu jenis pendidikan kejuruan telah banyak diusahakan agar biaya/unit itu diperkecil, namun apabila sudah sampai pada batas minimal tetapi ternyata hasilnya tidak efektif maka sebaiknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut ditutup, atau memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka tidak boleh dipaksakan harus dibuka atau beroperasi.

Teori utama yang digunakan dalam TVET adalah teori efisiensi sosial dari Prosser dan teori pendidikan TVET demokratis dari Dewey. Teori efisiensi sosial Prosser terkenal dengan sebutan Prosser's *theorems*. Keenam belas teori Prosser & Qigley di atas. Inti dari teori Prosser adalah TVET membutuhkan lingkungan pembelajaran yang menyerupai dunia usaha/industri dan peralatan/permesinan yang memadai sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di dunia usaha/industri. Agar hasil kerja TVET efektif, TVET harus melatih dan membentuk kebiasaan kerja sebagai kebutuhan yang harus dimiliki pekerja di dunia usaha/industri. Penguatan keterampilan kerja dapat ditingkatkan cara berpikir dan bekerja secara

efisien. Sekolah Menengah Kejuruan harus melaksanakan seleksi bakat dan minat. Guru TVET akan berhasil melatih jika telah memiliki pengalaman sukses dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan sesuai bidang yang dilatihkan. Standar kinerja dikembangkan. Berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri. Sekolah Menengah Kejuruan membutuhkan biaya pendidikan dan pelatihan yang relatif besar dan jika biaya tersebut tidak terpenuhi lebih baik TVET dibatalkan saja.

Teori pendidikan demokratis Dewey menjelaskan bahwa TVET tradisional yang mekanistik harus dikembangkan menjadi pendidikan yang demokratis. Peserta didik mengeksplorasi kapasitas dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan harus mampu melakukan proses transmisi dan transformasi budaya melalui kesetaraan posisi dalam ras, etnik, status sosial ekonomi di masyarakat. Setiap peserta didik memiliki pandangan positif terhadap orang lain, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah.

Program-program di SMK Model (Rujukan) disusun selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kemajemukan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja dalam berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik sektor primer, sekunder, tersier maupun kuartir. Oleh karena itu, keselarasan (*link & match*) antara SMK Model dan dunia kerja merupakan imperatif, baik dalam dimensi kuantitas (jumlah), kualitas (kompetensi), lokasi (tempat), maupun waktu (kapan) (Slamet PH: 2013: 21).

Dari ilustrasi tentang pembaharuan Pendidikan Kejuruan

tersebut di atas dengan kebijakan *link and match* adalah perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi Pendidikan Kejuruan sebagai program pengembangan sumber daya manusia. Dimensi pembaruan seperti berikut.

**Tabel 3. Dimensi Pembaruan SMK**

No	Masa Lalu	Menuju	Masa Depan
1	<i>Supply Driven</i>	→	<i>Demand Driven</i>
2	Pendidikan Berbasis Sekolah ( <i>School-Based Program</i> )	→	Pendidikan Berbasis Gnda ( <i>Dual-Based Program</i> )
3	Pengajaran Berbasis Mata Pelajaran ( <i>Subject Matter Based Program</i> )	→	Pengajaran Berbasis Kompetensi. ( <i>Competencies Based</i> )
4	Program Dasar yang Sempit ( <i>Narrow Based Program</i> )	→	Program Dasar yang Mendasar, Kuat, dan Lebih Luas ( <i>Broad Based Curriculum</i> )
5	Pendidikan Formal yang Kaku	→	Pendidikan yang Luwes <i>Multy Entry-Multy Exit</i>
6	Tidak mengakui keahlian dari luar sekolah	→	Mengakui kompetensi yang diperoleh dari manapun, dan dengan cara apapun ( <i>Recogn...</i> )
7	Pemisahan yang tegas antara Pendidikan dan Pelatihan	→	Pengintegrasian Pendidikan dan Pelatihan
8	Pendidikan bersifat terminal ( <i>Dead end</i> )	→	Pendidikan berkelanjutan (dengan <i>bridging program</i> )
9	Manajemen Terpusat (Sentrali- sasi)	→	Manajemen Mandiri (Desentralisasi)

10	Menggantungkan diri pada dana Pemerintah Pusat	→	Swadana, dengan subsidi dari Pemerintah Pusat.
----	--	---	--

(Sumber: Wardiman Djojonegoro, 1998: 77)

Salah satu upaya agar kualitas dapat ditingkatkan adalah semua SMK baik negeri maupun swasta wajib mengembangkan SMK berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga lulusannya memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan daya saing nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas delapan standar yaitu: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian.

Standar Nasional Pendidikan dijadikan sebagai pedoman bagi pengembangan seluruh komponen pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). Standar Nasional Pendidikan sebagai standar minimal dan oleh karenanya tidak boleh dikurangi, namun boleh ditambah, (Slamet PH, 2008). Dengan pengertian ini, SMK bertaraf nasional harus: (1) Merencanakan pengembangan sekolah berdasarkan delapan SNP seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 2 beserta sejumlah Permendiknasnya, (2) Melaksanakan SNP secara patuh tetapi sekaligus dinamis, adaptif, dan proaktif terhadap perkembangan mutakhir pendidikan nasional, (3) Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap program-program yang telah dilaksanakan,

dan (4) Melakukan revisi terhadap program-program yang telah dilaksanakan sesuai dengan hasil kajian dan tuntutan pengembangan pendidikan nasional, (Direktorat Pembinaan SMK, 2006a: 3). Artinya tamatan SMK bertaraf nasional dari tiap propinsi disiapkan untuk memenuhi kualitas mutu lulusan yang mampu bersaing dan mendapatkan pekerjaan di seluruh NKRI dengan tenaga kerja lain dari daerah lain yang datang untuk mengisi lowongan kerja. Tetapi kondisi SMK saat ini secara umum menurut Slamet PH (2013), masih menunjukkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

(1) hanya menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan peserta didiknya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan; (2) lemah dalam menyiapkan peserta didiknya untuk menjadi wirausahawan; (3) lambat daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi; (4) belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja; dan (5) belum ada kepastian jaminan terhadap peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Penyelenggaraan SMK yang efektif dan efisien adalah penyelenggaraan SMK yang mampu memberikan pengalaman bekerja (*real work experience*) kepada lulusannya. Prosser & Quigley (1950) menyatakan bahwa ada 16 prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang efektif dan efisien. Salah satu prinsip adalah menjalin kemitraan antara SMK dengan dunia usaha/industri. Pendidikan vokasi masa depan khususnya SMK masa depan membutuhkan guru, kompetensi kerja, dan kepala sekolah masa depan pula.

Pengembangan organisasi adalah strategi intervensi yang memanfaatkan proses kelompok berfokus pada budaya

organisasi secara menyeluruh untuk melakukan perubahan yang diinginkan (Newstrom & Davis, 1997). Tujuannya adalah:

- (1) menanggapi kebutuhan organisasi;
- (2) struktur imbalan tidak cukup memperkuat penerapan hasil pelatihan; dan
- (3) mengikuti perkembangan ipteks.

Langka-langkah mengembangkan organisasi:

- (1) menerapkan keputusan pimpinan untuk mengembangkan organisasi;
- (2) mendignosis kebutuhan oranisasi;
- (3) mengumpulkan data yang relevan;
- (4) menganalisis data dan membahas hasil pengolahan data;
- (5) merencanakan tindakan dan menyelesaikan masalah;
- (6) membina tim pengembang;
- (7) mengevaluasi hasil pengembangan dan menindak-lanjuti (Newstrom & Davis, 1997).

Greiner (1972) memberikan langkah-langkah pengembangan organisasi:

- (1) kreativitas diikuti dengan krisis kepemimpinan;
- (2) pemimpin baru memberikan arahan diikuti dengan krisis otonomi;
- (3) krisis otonomi diatasi dengan pendelegasian yang diikuti krisis pengendalian;
- (4) krisis pengendalian diatasi dengan pengkoordinasian diikuti krisis birokrasi;
- (5) krisis birokrasi diatasi dengan desentralisasi diikuti krisis.....

Tuckman (1982) memberikan langkah-langkah pengembangan organisasi:

- (1) pembentukan (*forming*);
- (2) perselisihan (*storming*);
- (3) pembuatan norma (*norming*); dan
- (4) peningkatan kinerja (*performing*). Newstrom & Davis (1997) menambahkan:
- (5) pembubaran (*adjourning*).

## **2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akhir-akhir ini tengah giat-giatnya membenahi kurikulum pendidikan nasional karena sebagian besar orang tua dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan mengeluhkan kelemahan kurikulum kita saat ini dan rendahnya mutu lulusan SMK.

Kurikulum VTET menurut Dewey berisikan kemampuan akademik yang luas dan mengintegrasikan kompetensi generik, teknis, interpersonal, dan karakter kerja. Kurikulum model Dewey mengartikulasikan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi relevan dengan dunia usaha/industri. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu membangun komunitas masyarakat secara sinergi menjadi anggota masyarakat yang aktif membangun budaya. Pengalaman yang nyata dan benar dapat menjadikan peserta didik mampu menghubungkan teori dengan praktik.

Kurikulum SMK saat ini kaya mata pelajaran, namun miskin kompetensi. Terjadinya krisis kepemimpinan, korupsi, amoral, tawuran, mutu lulusan, dan sebagainya, menurut sebagian ahli dan pengamat pendidikan disinyalir akibat

kegagalan kurikulum dan pembelajaran di kelas. Berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh Kemdikbud, meski terkesan masih “tambal sulam” seperti pada kurikulum yang sudah ada.

Sebagaimana kita ketahui kompetensi dasar yang perlu diberikan pada sekolah dasar adalah membaca, menulis, dan berhitung (calistung) atau *read, write, arithmetic* (3Rs). Dalam beberapa tahun lalu, kompetensi tersebut dianggap sudah menjadi solusi; terutama di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika ke-Indonesia-an, beberapa kompetensi yang diajarkan itu dirasa tidak cocok dengan tuntutan zamannya.

Xu Jinjie (2007) menyatakan bahwa kompetensi personal mengacu pada aspek-aspek pengembangan yang diinginkan seperti konsep diri yang positif (termasuk *self-esteem and sense of control*), kepercayaan diri, inisiatif, motivasi, komitmen untuk terus berkembang, dan perencanaan karir. Kompetensi personal juga meliputi kreativitas, ketekunan, kemampuan memikul tanggung jawab, memiliki sikap professional, memiliki kemampuan kejuruan, dan memiliki kecerdasan emosional. Selanjutnya yang termasuk kompetensi sosial di antaranya mempelajari tentang struktur dan tujuan organisasi, kemampuan untuk bekerja secara efisien dalam kelompok, bagaimana mengakses informasi, dan juga meliputi norma-norma professional, etika dan keterampilan komunikasi dan interaksi di tempat kerja, berkontribusi kepada perubahan ke arah kedewasaan, dan kesadaran akan kerja sosial.

Para lulusan SMK diharapkan secara bertahap dimasa yang akan datang dapat menguasai kualifikasi kompetensi tersebut di atas agar dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala regional maupun global. Oleh karena itu SMK harus siap mengemban misi pembangunan untuk mengembangkan sekolah berstandar nasional maupun internasional.

Menurut Trilling & Fadel dalam bukunya *21 Century Skill Learning for Live in Ourtimes* (2009), di sekolah masa depan pembelajaran harus selalu sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah hendaknya tidak sebatas calistung saja, tetapi perlu ditambah dengan tujuh kompetensi dasar.

**Kompetensi pertama**, *critical thinking and problem solving* atau pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Pengetahuan diawali dengan adanya rasa keingintahuan peserta didik. Rasa keingintahuan akan berkembang jika peserta didik selalu meragukan informasi yang diterimanya baik dari guru maupun sumber belajar lainnya. Oleh sebab itu, masing-masing peserta didik perlu dibekali cara agar mereka berpikir kritis. Guru dituntut memfasilitasi peserta didiknya berani bertanya karena esensi belajar adalah bertanya. Peserta didik diberi kesempatan berdebat dan berdiskusi secara ilmiah. Bukan debat kusir seperti yang pernah kita saksikan pada debat cagub/cawagub DKI di Metro TV. Bukan pula debat yang tidak beretika seperti yang pernah kita saksikan di *Indonesia Lawyer Clubs* TV-One. Agar peserta didik tidak mudah putus asa, mereka perlu dibekali cara menyelesaikan masalah. Guru sebaiknya

memberikan kasus-kasus nyata sesuai perkembangan usia peserta didik dalam diskusi-diskusi kelompok. Sampai saat ini guru sering menggunakan metode ceramah dan tugas menghafal kepada peserta didiknya. Dengan ceramah (metode mengajar yang paling rendah) dan menghafal (proses pembelajaran yang paling rendah) serta latihan menjawab pilihan ganda agar lulus UN, maka pemikiran kritis dan penyelesaian masalah oleh peserta didik mustahil terwujud.

**Kompetensi kedua**, *creativity and innovation* atau kreatif dan inovatif. Bagaimana cara merangsang agar peserta didik menjadi kreatif dan inovatif? Tentu saja guru dituntut memberikan pelajaran kepada peserta didiknya sedemikian rupa agar mereka kreatif dan inovatif. Misalnya guru senantiasa memotivasi peserta didik agar selalu berpikir ke luar dari kebiasaan umum. Membolehkan anak berpikir beda atau aneh dari kebiasaan. Membolehkan anak berpikir ke luar dari sistem yang berlaku. Dengan cara ini, peserta didik menjadi kreatif dan inovatif. Saat ini, guru belum memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif karena harus seragam menjawab jawaban yang tercantum dalam pilihan ganda untuk lulus UN.

**Kompetensi ketiga**, *collaboration, teamwork, and leadership* atau kerja sama, kerja tim, dan kepemimpinan. Abad 21 ini memerlukan manusia-manusia yang mampu bekerja sama, memiliki keterampilan sosial, peduli sosial dan lingkungan. Dalam kerja tim menurut Deddy Supriadi & Fasli Jalal (2002) membutuhkan prinsip **TEAMWORK** atau *together* (kebersamaan), *emphaty* (peka terhadap perasaan orang lain), *assist* (membantu orang lain), *maturity* (kedewasaan),

*willingness* (ada kemauan), *organization* (teratur), *respect* (hormat atau sopan santun)), *Kind* (berbaik hati). Guru hendaknya mencontohkan bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bekerja yang kompak dalam tim guru, dan keteladanan kepemimpinan di dalam kelas seperti kejujuran, berani, tabliq, amanah, cerdas, kompeten, komitmen, visioner, dan pemberi ilham (inspiratif). Guru dalam pembelajaran hendaknya memberikan keteladanan kepemimpinan karena ia “imam” di kelasnya. Dengan sistem pelajaran yang mengutamakan ceramah, hafalan dan memilih jawaban pilihan ganda agar lulus UN, tidak ada lagi kerja sama, kerja tim, dan kepemimpinan yang dialami peserta didik yang akibatnya terjadi sifat mementingkan diri sendiri, tidak sopan berlalu lintas, suka menyerobot, korup, tawuran, dan krisis kepemimpinan seperti sekarang ini.

**Kompetensi keempat**, *cross-cultural understanding* atau pemahaman keragaman kebudayaan. Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan. Misalnya, Budaya Batak berbeda dengan budaya Jawa, berbeda dengan budaya Sunda, Bugis, Minang dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di kelas guru harus mendidik peserta didiknya untuk memiliki kesadaran, menghormati, menghargai dan mencintai adanya keberagaman budaya tersebut. Toleransi terhadap budaya orang lain yang akan melahirkan rasa cinta damai, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Dengan sistem pelajaran yang mengutamakan ceramah, hafalan dan memilih jawaban pilihan ganda agar lulus UN, tidak ada kesempatan peserta didik untuk memahami dan mencintai keragaman budaya.

**Kompetensi Kelima, *communications, information, and media literacy*** atau komunikasi, informasi, dan melek media. Komunikasi yang efektif jika pesan yang disampaikan tertulis, tulis, dan bahasa tubuh mudah diterima oleh penerima pesan sesuai dengan harapan pemberi pesan. Sebaliknya, peserta didik sebagai penerima pesan dengan mudah menerima pesan yang disampaikan orang lain baik secara tertulis, lisan, maupun bahasa tubuh. Perusahaan-perusahaan di luar negeri berani membayar lebih tinggi kepada karyawannya yang komunikatif (bersahabat) ketimbang yang tidak komunikatif. Informasi adalah kekuasaan. Siapa yang paling banyak informasinya, maka ia akan berkuasa dan akan memenangkan persaingan. Singapura misalnya adalah negara yang kaya dengan informasi sehingga ia menjadi yang unggul di bidang bisnis. Guru hendaknya menginspirasi peserta didik agar mencari, menjangkau, dan mengolah informasi dari berbagai sumber sesuai prioritas kebutuhannya. Dengan sistem pelajaran yang mengutamakan ceramah, hafalan dan memilih jawaban pilihan ganda agar lulus UN, tidak ada kesempatan peserta didik untuk memperoleh informasi selain yang dipeklajarnya.

**Kompetensi keenam, *computing and ICT literacy*** atau komputerisasi dan melek teknologi komunikasi dan informasi. Barang siapa tidak bisa menggunakan komputer dan gagap ICT dapat dipastikan akan ketinggalan zaman. Namun, peserta didik perlu diingatkan agar dalam mempergunakan ICT tidak semua informasi diakses. Peralnya, di dunia internet dan komunikasi banyak informasi negatif dan tidak sesuai bagi perkembangan peserta didik.

Oleh karena itu, meski peserta didik dituntut melek media agar tidak tertinggal dengan kemajuan ICT, mereka juga harus diajarkan bagaimana menyaring dan memilah aneka ragam informasi itu. Pendek kata, peserta didik juga harus memiliki saringan dalam dirinya, agar mampu menyaring informasi secara tepat. Dengan sistem pelajaran yang mengutamakan ceramah, hafalan, dan memilih jawaban pilihan ganda agar lulus UN, tidak ada lagi peluang bagi peserta didik untuk menguasai ICT.

**Kompetensi ketujuh, *career and learning self-reliance*** atau karir dan percaya diri. Karir peserta didik hendaknya disiapkan sejak dini. Sejak awal, peserta didik diminta oleh para guru untuk menyebutkan keinginan karir yang akan mereka raih kelak. Tanyakan pada peserta didik, kelak mereka mau jadi apa? Setelah mengetahui cita-cita peserta didik kelak, maka para guru harus terus memotivasi peserta didiknya untuk terus belajar dan berusaha sekuat tenaga mengejar impiannya tersebut. Kemudian guru berkewajiban mendidik, mengajar, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik tersebut sesuai dengan minat bakat, dan perkembangan usianya. Dengan sistem pelajaran yang mengutamakan ceramah, hafalan, dan memilih jawaban pilihan ganda agar lulus UN, tidak ada peluang peserta didik untuk memikirkan karir dan percaya diri. Mereka hanya percaya bahwa dengan kuat menghafal, mereka akan lulus UN.

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci bagi kemajuan dan keunggulan sebuah bangsa. Hanya bangsa yang berkualitas tinggi yang menjadi

pemenang dalam persaingan lokal, regional, dan internasional. Agar sumber daya manusia mampu bersaing dan menjadi pemenang dalam mengatasi zamannya, maka manusia Indonesia harus memiliki keterampilan abad 21 yaitu: (1) *leadership*, (2) *digital literacy*, (3) *communication*, (4) *emotional intelligence*, (5) *entrepreneurship*, (6) *global citizenship*, (7) *problem solving*, dan (8) *team-working* (Pearson-Learning Curve Report, 2014).

Kompetensi pertama Trilling & Fadel sama dengan butir ke-7 Pearson. Kompetensi kedua Trilling & Fadel merupakan sifat-sifat butir-5 Pearson. Kompetensi ketiga Trilling & Fadel sama dengan butir ke-1, ke-8 Pearson. Kompetensi kelima Trilling & Fadel sama dengan butir ke-3, ke-2 Pearson.

### **3. *Link and Match* SMK dengan Dunia Usaha/Industri**

Sejarah dibentuknya SMK tidak lepas dan kebijakan pendidikan *link and match* yang diterapkan Wardiman Djojonegoro ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 sampai dengan 1998). Konsep *link and match* bukanlah temuan Wardiman Djoyonegoro, tetapi mengadopsi dari pikiran Willenbrock, guru besar *Harvard University*. Amerika Serikat. Willenbrock mengusulkan gagasan tentang pentingnya perusahaan menjadi “Bapak angkat” bagi perguruan tinggi. Menurut Willenbrock, perusahaan tidak hanya sekadar tempat berlatih atau magang mahapeserta didik tetapi juga menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mengembangkan perguruan tinggi. Gagasan Willenbrock ini disebut konsep *link and*

*match*. Selanjutnya konsep ini diperkenalkan secara luas di dunia.

Gagasan Willenbrock ini berasal dari kekecewaannya melihat banyaknya lulusan pendidikan yang menjadi penganggur karena kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Konsep *link and match* diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran terdidik. Kebijakan *link and match* merupakan salah satu kebijakan terkini dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Secara filsafat, kebijakan *link and match* berwawasan: (1) sumber daya manusia; (2) masa depan; (3) mutu dan keunggulan; (4) profesionalisme; (5) nilai tambah; dan (6) efisiensi.

Wawasan sumber daya manusia pada kebijakan *link and match* berusaha menempatkan pendidikan di SMK sebagai subsistem dari sistem pembangunan nasional dalam peran dan tugas pengembangan sumber daya manusia. Wawasan sumberdaya manusia menuntut supaya penyelenggaraan pendidikan pada SMK tidak hanya sekedar layanan sosial terhadap masyarakat, tetapi secara sungguh- sungguh dapat diandalkan menghasilkan tamatan yang berkualitas tinggi, yang memiliki kemampuan produktif, untuk menjadi aset bangsa. Biaya yang diinvestasikan bagi pengembangan dan operasional pendidikan kejuruan, baik yang bersumber dari pemerintah,

pinjaman asing, orangtua peserta didik dan masyarakat, harus memiliki nilai ekonomi, harus *accountable*, tidak boleh lagi sekedar penyelenggaraan pendidikan demi pendidikan. Sebagai subsistem dari sistem pembangunan nasional, (Wardiman Djojonegoro, 1998:59), SMK harus dapat diandalkan untuk peranan dan tugas sebagai berikut.

Menghasilkan tamatan yang memiliki keterampilan dan penguasaan iptek, dengan bidang dan tingkat keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, untuk mengisi kebutuhan industrialisasi,

(b) Menghasilkan tamatan yang memiliki kemampuan produktif, keahlian yang mampu membuat tamatan berpenghasilan sendiri dengan pekerjaan dan penghasilan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat sendiri, dan merubah status tamatan dari status beban (karena harus dihidupi orang lain) menjadi asset bangsa (yang mampu menghidupi diri sendiri dan orang lain),

(c) Menghasilkan tamatan yang berkualitas tinggi dan memiliki keunggulan, dan mampu berperan sebagai faktor keunggulan kompetitif industri Indonesia menghadapi persaingan global,

(d) Menghasilkan tamatan yang memiliki bekal dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang kuat, dan memadai bagi tamatan yang bersangkutan agar dapat mengembangkan kualitas dirinya.

Berdasarkan wawasan sumber daya manusia, tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh SMK akan diukur dengan *rate of return* biaya investasi yang dibelanjakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, tidak cukup dengan *social return* saja. Banyaknya lulusan SMK yang menganggur, dan lamanya tamatan SMK mendapatkan pekerjaan atau bekerja sendiri harus diperhitungkan sebagai kegagalan SMK.

Peserta didik yang masuk ke SMK pun, berdasarkan wawasan kebijakan *link and match* ditentukan oleh kualitas lulusan pendidikan sebelumnya (SD dan SMP). Tetapi masyarakat umum kurang menyadari, karena kurang memiliki wawasan masa depan. Sering terjadi kekeangpuasan terhadap produk pendidikan yang dirasakan saat ini, menimbulkan kritik yang ditujukan terhadap sistem, program, dan proses yang berlangsung sekarang ini.

Wawasan masa depan kebijakan *link and match* mengandung pemikiran, bahwa: “Produk pendidikan yang diperoleh saat ini adalah produk pendidikan masa lalu, dan proses pendidikan yang dilakukan sekarang ini adalah untuk masa depan”. Misalnya jika ingin menghasilkan lulusan SMK yang bermutu tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif, diperlukan waktu tiga tahun sesuai dengan satuan lama pendidikan. Jika perlu lama pendidikan di SMK ditambah menjadi empat tahun. Di samping itu, diperlukan sumber dana yang memadai untuk melengkapi sarana dan prasarana SMK agar dapat mengikuti perkembangan ipteks yang terjadi di dunia usaha/industri.

Kebijakan *link and match* yang berwawasan masa depan menurut Wardiman Djojonegoro (1998:60-61), menuntun SMK menganut prinsip sebagai berikut:

- (a) Program pendidikan pada SMK yang berproses selama tiga tahun, disiapkan untuk menghasilkan tamatan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan tiga tahun mendatang, dan memiliki bekal dasar untuk pengembangan diri di masa depan,

(b) Dunia kerja yang menjadi lapangan hidup tamatan SMK adalah dunia ekonomi, dunia yang mengandung fenomena persaingan dan kerjasama, sekaligus dunia yang cepat mengalami perubahan. Karena itu program pendidikan SMK harus mengandung muatan: (1) Kompetensi produktif, yang memungkinkan tamatan sesegera mungkin bekerja setelah tamat dari SMK, (2) Memiliki keunggulan sebagai faktor keunggulan kompetitif menghadapi persaingan, dan sebagai modal kuat untuk menjalin kerja sama, dan (3) Memiliki bekal dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap, sebagai bekal dasar menguasai perkembangan ipteks, dan sebagai dasar penyesuaian diri.

Wawasan mutu pada kebijakan *link and match*, mengukur mutu tamatan SMK dengan ukuran dunia kerja. Cara-cara konvensional mengukur hasil pembelajaran SMK dengan angka nol sampai sepuluh, atau angka nol sampai seratus, sudah tidak memadai lagi, dan tidak sesuai dengan ukuran dunia kerja. Dunia kerja mengukur kompetensi tenaga kerjanya dengan memperhatikan kualitas hasil kerjanya dan tingkat produktivitas kerjanya. Pengukuran terhadap kualitas hasil kerja hanya dengan dua ukuran dasar, yaitu: baik (*accepted*) dan jelek (*rejected*). Kalau hasil kerja baik, baru diperhatikan lagi tingkat kebaikan/keberhasilannya, karena tingkat mutu baik itu sendiri, akan mempengaruhi harga jual. Sebaliknya kalau jelek atau gagal, langsung dirasakan sebagai kerugian atau "*lost*".

Wardiman Djojonegoro (1998: 61-62) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan wawasan mutu sesuai dengan kebijakan *link and match*, antara lain adalah:

- (a) Ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat kemampuan tamatan SMK, adalah ukuran dunia kerja. Dalam proses evaluasi hasil belajar SMK perlu dilengkapi dengan hasil uji kompetensi, yaitu proses pengujian oleh pihak dunia kerja dengan memakai ukuran dunia kerja,
- (b) Tingkat produktivitas dan kualitas hasil kerja seseorang, sangat kuat dipengaruhi oleh cara kerja, teknologi yang digunakan dan sikap kerja pekerja tersebut. Karena itu, SMK dituntut mentransfer cara kerja yang benar, melatih penguasaan iptek, serta membentuk sikap melalui proses pembiasaan kerja yang benar,
- (c) Guna mendapatkan standar mutu hasil yang sesuai dengan ukuran dunia kerja, diperlukan proses yang sesuai dengan cara kerja industri. Sehingga untuk mendapatkan mutu tamatan SMK yang baik, diperlukan keikutsertaan dan kerjasama dengan dunia kerja, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, dan evaluasi hasilnya.

Wawasan keunggulan pada kebijakan *link and match* memberikan pandangan, bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi dan memiliki keunggulan adalah faktor keunggulan kompetitif utama yang harus dimiliki Indonesia menghadapi persaingan global. Wawasan keunggulan pada kebijakan *link and match* mensyaratkan agar sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan memiliki keunggulan adalah keunggulan kompetitif utama yang harus dimiliki sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global khususnya dengan negara-negara MEA. Persaingan industri dan perdagangan akan selalu mengacu segmen pasar dan kemampuan memasarkan produk dan jasa. Karena betapa hebatnya produk dan

jasa yang dihasilkan suatu dunia usaha/industri, namun tidak mampu memasarkan menyebabkan produk dan jasa tersebut tidak laku di pasaran sehingga menyebabkan perusahaan/industry menjadi bangkrut atau tutup.

Yono (2014: 125) menerapkan kebijakan *link and match* untuk meningkatkan mutu SMK dalam penelitiannya menyatakan:

Kebijakan *link and match* dilaksanakan oleh SMK dengan berbagai ragam bentuk dan model. Model “Pendidikan Kelas Industri” adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebijakan *link and match*, yaitu suatu model pelaksanaan pendidikan kejuruan yang diatur dan disepakati oleh sekolah dan industri. Peserta didik menerima pendidikan di sekolah berupa mata pelajaran normatif, adaptif dan dasar kejuruan. Sedangkan di industri peserta didik bekerja langsung di lapangan sesuai pekerjaan yang ada. Sistem pendidikan diatur secara berlapis dengan sistem blok, direncanakan, dilaksanakan dan disupervisi oleh sekolah dan industri secara terpisah atau bersama-sama. Model ini memadukan antara pembelajaran yang berorientasi pada latihan kerja di sekolah dan pengalaman belajar dengan bekerja di industri. Pengalaman belajar dan bekerja yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan program studi dan tujuan karir peserta didik. Keterpaduan pengalaman latihan kerja di sekolah dan bekerja di industri akan membentuk karakter peserta didik untuk bertanggung jawab, disiplin dan menyenangkan pekerjaan sehingga model “Pendidikan Kelas Industri” mampu meningkatkan mutu lulusan SMK.

Penelitian yang dilakukan Yono (2014: 130-31) menyimpulkan:

Pendidikan kelas industri (*industrial education*)

*class*) yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Singosari Malang adalah model pendidikan kejuruan yang menyediakan pembelajaran di kelas disertai dengan pembelajaran yang dilaksanakan di industri dengan peserta didik bekerja langsung di tempat kerja. Pendidikan kelas industri (*industrial education class*) dilaksanakan dengan adanya:

- (1) kerja sama saling menguntungkan dan saling membutuhkan (*simbiosis mutualism*);
- (2) pendidikan dirancang oleh sekolah dan industri;
- (3) rotasi antara belajar di sekolah dan di dunia kerja/industri;
- (4) perjanjian kerja sama secara tertulis antara kedua belah pihak;
- (5) model ini memadukan antara pengajaran yang berorientasi lapangan kerja (*occupationally oriented instruction*) di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan kerja (*work related learning experience*) di industri; dan
- (6) terjaminnya lapangan kerja bagi lulusan SMK, karena langsung direkrut oleh industri setelah tamat.

Penelitian Yono tersebut meneliti pelaksanaan model “Pendidikan Kelas Industri” disingkat Model “Diklastri”. Uraian tentang Model “Pendidikan Kelas Industri” merupakan alternatif meningkatkan mutu pendidikan di SMK dengan fokus penelitian model “Diklastri” sebagai alternatif meningkatkan mutu lulusan di SMK sebagai berikut. (1) Langkah-langkah persiapan pelaksanaan model “Diklastri”. (2) Pelaksanaan pendidikan dengan model “Diklastri; sedangkan penelitian ini meneliti implementasi kebijakan *link and match* dengan subfokus: faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi kebijakan *link and match* SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta; hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan *link and match* SMKN di

Daerah Istimewa Yogyakarta; dan solusi mengatasi hambatan untuk meningkatkan mutu implementasi *link and match* SMK di masa yang akan datang.

Hasil FGD Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja (2016) yang berkaitan dengan *link and match* SMK dengan dunia/industri dari SMKN Bantul adalah: (1) sinkronisasi antara SMK dengan dunia usaha/industri; (2) struktur Kurikulum 2006 masih memungkinkan untuk menyelenggarakan sinkronisasi antara SMK dengan dunia usaha/industry; dan (3) membuat jurusan baru Perbankan Syariah, setelah menjadi Kurikulum 2013, (4) SMK kesulitan melakukan sinkronisasi antara SMK dengan dunia usaha/industri.

Hasil FGD Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja (2016) yang berkaitan dengan *link and match* SMK dengan dunia/industri dari SMKN 2 Depok adalah: (1) promosi dengan dunia usaha/industri sudah aktif dilaksanakan oleh SMK karena ada anggaran khusus; (2) kurikulum kebanyakan dari dunia usaha/industri (Toyota); (3) menjembatani anak-anak di luar SMK yang ingin mengikuti tes langsung dunia usaha/industri (Toyota), (4) peserta didik cenderung ingin melanjutkan studi lagi (kuliah), padahal banyak dunia usaha/industri yang membutuhkan tenagakerja; dan (5) di kurikulum lama (KTSP) bias lebih optimal dalam pengembangan kurikulum dengan dunia usaha/industri, sedangkan di Kurikulum 2013 cenderung belum dapat mengcover permintaan penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha/industri.

Hasil FGD Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja (2016) yang berkaitan dengan *link and match* SMK dengan dunia/industri dari SMKN 1 Depok: (1) mengirimkan lulusan ke Malaysia lima orang di perusahaan hotel; dan (2) bagaimana memproteksi lulusan SMK yang bekerja keluar negeri agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang.

Hasil FGD Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja (2016) yang berkaitan dengan *link and match* SMK dengan dunia/industri dari SMKN 6 Yogyakarta: (1) SMKN 6 Yogyakarta ditunjuk sebagai pelaksanaan *technopark*, pihak sekolah khawatir apabila sudah berhasil diambil alih pemerintah, sedangkan SMK membutuhkan sebagian dari hasil tersebut untuk pengembangan manajemen; (2) dunia usaha/industri yang masih bekerja sama (Praktik Industri) dengan pihak SMK hanya pada dunia usaha/industri yang tidak melakukan pemungutan pada peserta didik; (3) industry busana, tata rias belum ada standarnya; (4) kerja sama di dunia usaha/industri juga dilakukan untuk tempat magang guru-guru SMK; (5) dunia usaha/industri juga diundang sebagai guru tamu di SMK; anak-anak belum terbiasa dan tertarik dengan perusahaan yang melakukan rekrutmen dengan target kerja.

Hasil FGD Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja (2016) yang berkaitan dengan *link and match* SMK dengan dunia/industri dari Direktorat PSMK: (1) tuntutan pendewasaan anak (lulusan SMK), (2) diperlukan bagaimana bimbingan karir untuk pendewasaan anak dapat diakomodasi oleh guru BK di SMK; (3) belum ada

pedoman penyusunan tentang pemagangan peserta didik SMK; (4) belum ada pedoman layanan BKK di SMK; (5) apakah perlu ada pedoman lain apabila sudah ada Standar Nasional Pendidikan; (6) apakah perbedaan antara BLU dengan Unit Produksi yang ada di SMK dan apakah ada regulasinya?; (7) pengelolaan *teaching factory* belum ada paying hukumnya; (8) perbaikan karakter untuk lulusan SMK yang bekerja di luar negeri; (9) lulusan SMK yang siap kerja seharusnya sudah dibina dari awal dan terlibat lebih dalam dengan SMK untuk mengembangkan kurikulum; (10) perlu contoh-contoh implementatif dalam naskah kajian yang lebih detail, contoh model penyelarasan; (11) mohon diperkuat dengan sampel data di lapangan, seperti studi kasus; (12) SMK selalu berhubungan dengan erat dengan dunia usaha/industry; (13) kKepentingan antara SMK dan dunia usaha/industry disamakan, agar tidak ada yang dirugikan; (14) ada Perpres yang memayungi program Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja; (15) pendidikan kooperatif, dan jemput bola ke dunia usaha/industry; dan (16) Subdit baru penyelarasan dengan dunia kerja dan industri (SubditLasjurin) fokus pada: MKPI, Kerja sama dengan industri, dan penyelarasan dengan industri.

Hasil FGD Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja (2016) yang berkaitan dengan *link and match* SMK dengan dunia/industry dari perusahaan DPD Asita Yogyakarta mengharapkan lulusan: (1) yang siap untuk bekerja; (2) menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris; (3) melakukan diklat lulusan SMK merupakan *cost* bagi mereka.

Hasil FGD di atas masih terdapat kekurangan antara lain belum mendiskusikan atau meneliti masalah analisis kebijakan *link and match* SMKN dengan dunia usaha/industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan**

Asumsi, teori-teori, dan berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa guru adalah faktor utama yang menentukan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik karena guru langsung tatap muka dengan peserta didik di kelas. Anonim (2012: 4) menyatakan, “*Since the quality of the teacher is the single biggest in school factor predicting student achievement, effective teachers and school leaders are very heart of educational policy.*” (Sejak kualitas guru sebagai faktor terpenting di sekolah yang menentukan hasil belajar peserta didik, guru dan kepala sekolah efektif adalah hal sangat penting dalam kebijakan pendidikan). Selanjutnya, Anonim (2012: 6) menyatakan:

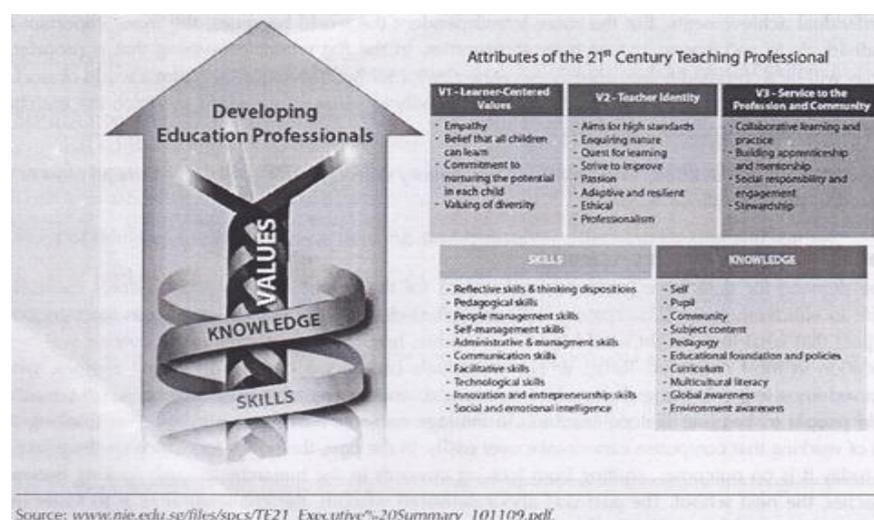
*The definition divided twenty-first century skills, knowledge, and attitudes into four categories.*

- **Way of thinking:** *creativity/innovation, critical thinking, problem-solving, decision-making, and learning to learn.*
- **Way of working:** *communication and collaborations/teamwork.*
- **Tools for working:** *including information and communications technologies.*
- **Living in the world:** *citizenship, life and career and personal, and social responsibilities, including cultural awareness and competence.*

(Definisi keterampilan abad 21 yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap dibagi menjadi empat kategori:

- **Cara berpikir:** kreativitas/inovasi, berpikir kritis, penyelesaian masalah, dan belajar cara belajar.
- **Cara bekerja:** komunikasi dan kerja sama/kerja tim.
- **Alat untuk bekerja:** termasuk informasi dan teknologi informasi.
- **Hidup di dunia:** bermasyarakat, pengembangan karir dan personal, serta tanggung jawab sosial termasuk kepedulian budaya dan kompetensi).

Kompetensi guru SMK masa depan tidak jauh berbeda dengan kompetensi peserta didik SMK masa depan. Perbedaannya hanya terletak dalam pemilihan kata dan jumlah dan peruntukannya saja. Jika kompetensi peserta didik SMK untuk bekerja sesuai bidangnya, maka kompetensi guru SMK untuk: mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Referensi lain tentang kompetensi guru profesional abad 21 ditunjukkan oleh gambar berikut.



**Gambar 3. Keterampilan Guru Profesional Abad**

Data Direktorat Pembinaan Guru Dikmen (2015) menemukan bahwa nilai UKG guru hanya 5% amat baik bertolak belakang dengan nilai Penilaian Kinerja Guru yang dilakukan kepala dan pengawas terhadap guru yang dibinanya ternyata 95% amat baik bahkan ada satu sekolah nilai PKG 100% amat baik.

## **5. Sertifikasi Guru SMK Produktif**

Sertifikasi guru ditinjau filsafat Pendidikan akan menjawab empat pertanyaan yakni: (1) apakah sertifikasi guru itu? (2) Apa tujuannya?, (3) apa manfaatnya?, dan (4) bagaimana pelaksanaannya? Pertanyaan (1) berkenaan dengan ontologi. Pertanyaan (2) dan (3) berkenaan aksiologi. Pertanyaan (4) berkenaan dengan epistemologi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi kompetensi guru SMK Produktif adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar uji kompetensi sesuai dengan paket keahlian masing-masing yang diampu sesuai dengan perundang-undangan. *National Commission on Educational Service* (NCES), memberikan definisi sertifikasi secara lebih umum, “*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidates credentials and provides him or her a license to teach.*”

Perbedaan sertifikasi profesi guru dengan sertifikasi kompetensi guru SMK produktif seperti tabel berikut.

**Tabel 3. Perbedaan antara Sertifikasi Profesi dan Sertifikasi Kompetensi**

No.	Aspek	Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi
1	Lembaga Pemberi Sertifikat	LPTK yang ditunjuk pemerintah	LSP yang mendapat lisensi BNSP
2	Bidang yang disertifikasi	Standar kompetensi guru (kepribadian sosial, pedagogi, profesional)	Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
3	Masa Berlaku	Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru	Sesuai ketentuan yang berlaku di BNSP
4	Pengakuan	Guru profesional	Kompeten di paket keahliannya
5	Penghargaan	Tunjangan Profesi	Asesor uji kompetensi
6	Peserta	Semua Guru	Guru SMK Produktif

## 6. Kepemimpinan Kepala SMK Masa Depan

Kepala sekolah adalah orang kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sekolah mencapai tujuannya. Tidak ada sekolah yang hebat tanpa dipimpin oleh kepala sekolah yang hebat pula. Banyak hasil penelitian menemukan bahwa kepala sekolah yang efektif merupakan faktor kunci yang menentukan sekolah efektif (Huber, 2010:

57-58). Sebagai pemimpin, ia menjadi contoh (teladan) bagi warga sekolah yang dipimpinnya.

Kepemimpinan merupakan: (1) salah satu faktor strategi peningkatan keefektifan pembelajaran, (2) salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi Kurikulum 2013, dan (3) salah satu subsistem dalam sistem implementasi Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output. Input siswa diproses melalui kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana dengan dukungan manajemen sekolah dan kepemimpinan, iklim akademik dan budaya sekolah menghasilkan output berupa lulusan yang kompeten.

Perubahan salah satu subsistem dalam hal ini subsistem kurikulum berdampak pada perubahan subsistem lainnya termasuk kepemimpinan kepala sekolah. Model kepemimpinan kepala sekolah yang akan diubah adalah dari model kepemimpinan administratif menuju kepada kepemimpinan pembelajaran karena berdasarkan hasil penelitian ternyata kepemimpinan pembelajaran berpengaruh **tidak langsung** pada hasil belajar siswa karena penerapannya melalui guru mengajar di kelas. berhadap. Oleh sebab itu, kepemimpinan pembelajaran perlu dipahami dan diterapkan oleh kepala sekolah kepada guru di sekolah yang dipimpinnya.

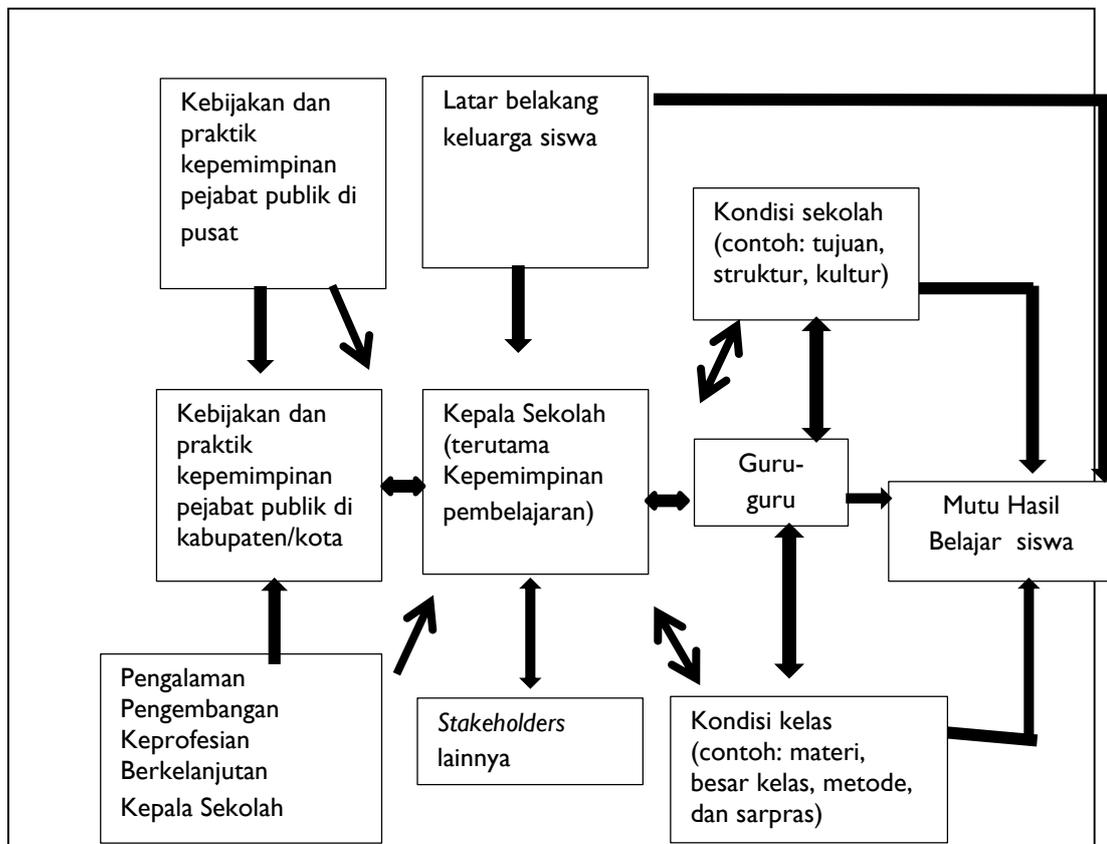
Kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang fokus pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan staf, supervisi pembelajaran, program pembelajaran, evaluasi program guru dan siswa,

penelitian tindakan, penyiapan sumber daya organisasi, dan peningkatan mutu hasil dan proses pembelajaran secara terus-menerus (Cunningham & Cordeiro, 2009: 146). Kepemimpinan pembelajaran menurut Bush (2010: 18), “Kepemimpinan pembelajaran fokus pada pembelajaran dan perilaku guru dalam mengajar siswa. Pengaruh pemimpin ditargetkan pada hasil belajar siswa melalui guru. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan **kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran melalui guru.**

Kepala sekolah (*school leader*) sering disebut *educational leader*, *instructional leader*, atau *visionary leader* (Huber, 2010: 241).

**Kepemimpinan pembelajaran mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa secara tidak langsung melalui guru** karena sesuai dengan definisi kepemimpinan menurut Hoy & Miskel (2013: 427), “*We define leadership broadly as a social process in which an individual or group influences behavior toward a shared goal.*” (Kami mendefinisikan kepemimpinan secara luas sebagai suatu proses sosial di mana individual atau kelompok mempengaruhi perilaku mencapai tujuan bersama). Pendapat Hoy & Miskel tersebut sejalan dengan Husaini Usman (2013: 312) yang menyatakan kepemimpinan adalah ilmu dan seni memengaruhi individu/dan atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemimpinan pembelajaran berpengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar siswa (Lihat Gambar 3).



**Gambar 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa (Leitwood, et al., 2004: 18 & Anonim, 2010: 14)**

Hasil diskusi *The Summit* antara lain menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berubah dari kepemimpinan administratif menuju kepemimpinan pembelajaran (Anonim, 2012: 21). Model kepemimpinan otoriter/managerial berubah ke model kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan guru. Kepemimpinan yang fokus pada pembelajaran adalah hal yang paling penting untuk

keberhasilan sekolah di masa yang akan datang (Anonim, 2012: 21). Jadi, kepala sekolah di abad 21 tidak lagi disibukkan oleh urusan administratif tetapi lebih disibukkan oleh urusan pembelajaran di kelas.

*Educational Leadership Constituent Council (ELCC)* yang beranggotakan 10 organisasi pendidikan nasional termasuk Amerika Serikat memiliki tujuh standar kepala sekolah. Dari tujuh standar kepala sekolah ternyata enam standar mengandung kalimat, ".....pemimpin-pemimpin pendidikan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan keberhasilan seluruh siswa dengan.... Artinya, kepala sekolah harus menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang lebih fokus pada keberhasilan seluruh siswanya. Sejalan dengan OLCC, *Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC)* menekankan pentingnya kepemimpinan pembelajaran (Schleicher, 2012: 23).

**Tujuan** kepemimpinan pembelajaran adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. Mutu proses pembelajaran meliputi terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan di dalam dan di luar kelas. Mutu hasil pembelajaran meliputi prestasi akademik dan nonakademik siswa. **Manfaat** kepemimpinan pembelajaran adalah untuk:

- (1) mengubah pola pikir kepala sekolah dari kepemimpinan administratif ke kepemimpinan pembelajaran,
- (2) meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan kepala sekolah dalam memotivasi dan memfasilitasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran,

- (3) menyadarkan kepala sekolah akan pentingnya kepemimpinan pembelajaran,
- (4) membangun komunitas belajar warga sekolah sebagai sekolah pembelajar (*learning school*).

**Peran** kepemimpinan pembelajaran adalah:

- (1) mendefinisikan dan mengkomunikasikan misi sekolah,
- (2) mengkoordinasikan kurikulum,
- (3) mensupervisi dan mendukung guru,
- (4) memantau kemajuan siswa, dan
- (5) memelihara iklim positif dalam kelas (Cunningham & Cordeiro, 2009:

144).

**Ciri-ciri (karakteristik) kepemimpinan pembelajaran yang efektif** yaitu:

- (1) memantau kinerja guru terus-menerus,
- (2) menilai kinerja guru,
- (3) melaksanakan dan mengatur pendampingan dan pelatihan guru,
- (4) merencanakan PKB guru,
- (5) mengkoordinasikan kerja tim, dan
- (6) mengkoordinasikan pembelajaran kolaboratif (OECD, 2009). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

**Tanggung jawab** kepemimpinan pembelajaran yang sangat erat kaitannya dengan hasil belajar siswa yaitu:

- (1) dukungan, pengevaluasian, dan pengembangan mutu guru sebagai kunci keberhasilan siswa;

- (2) pengaturan tujuan sekolah untuk kinerja siswa, pengukuran kemajuan siswa;
- (3) penggunaan strategi sumber daya yang focus pada seluruh kegiatan belajar dan mengajar; dan
- (4) kemitraan dengan masyarakat, lembaga-lembaga profesi yang relevan, dan universitas untuk pengembangan siswa secara menyeluruh (Anonim, 2012: 19).

Hasil penelitian Husaini & Eko Nuryadin (2013: 1-15) menyimpulkan bahwa strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi Kurikulum 2013 meliputi empat kategori yaitu:

- (1) keteladanan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah,
- (2) pembelajaran di kelas dan luar kelas,
- (3) iklim dan budaya (kultur) sekolah, dan
- (4) penguatan kepemimpinan kepala sekolah.

**Cara praktis** melaksanakan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu:

- (1) menetapkan visi dan tujuan belajar (mengacu standar kompetensi lulusan);
- (2) membangun tim kerja yang kuat (termasuk menilai dan meningkatkan kinerja guru);
- (3) mewujudkan dan mendukung budaya sekolah yang kondusif;
- (4) mengkomunikasikan visi belajar, mengarahkan cara mencapainya;
- (5) merekrut, mengembangkan, dan melatih kembali kepala sekolah dan PKB guru;

- (6) membangun dukungan internal dan eksternal sekolah;
- (7) memelihara dan tetap fokus pada pembelajaran  
(melaksanakan supervisi akademik di kelas) (Levin, 2012: 177).

### **Ciri-ciri Kepemimpinan efektif kepala sekolah di abad**

#### **21**

- (1) Kepemimpinan yang jujur, yang membela kebenaran, dan memiliki pengetahuan nilai-nilai utama.
- (2) Kepemimpinan yg mau dan mampu mendengarkan suara guru, tenaga kependidikan, siswa. Orang-tua, dan lain-lain.
- (3) Kepemimpinan yg menciptakan “*surplus of vision*”-sebagai milik kita semua.
- (4) Kepemimpinan yang hanya percaya pada data yang benar.
- (5) Kepemimpinan yang memulai kepemimpinannya dengan introspeksi dan refleksi.
- (6) Kepemimpinan yang memberdayakan diri kita semua dan berbagi informasi, mengambil keputusan bersama.
- (7) Kepemimpinan yg melibatkan pengidentifikasian, berkenaan dengan hambatan-hambatan personal untuk berubah baik secara personal maupun organisasional (Reinhartz & Beach, 2004).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengembangan SMK Masa Depan**

Pengembangan SMK merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan bonus demografi tahun 2030. Dalam hal ini, pemerintah ingin meniru Jerman yang sejak awal mendorong generasi muda untuk fokus memiliki keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara demikian, lulusan SMK diharapkan mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Pola pendidikan yang fokus pada penguasaan kejuruan bisa menghasilkan angkatan kerja yang terampil. “Pemerintah Federal Jerman bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk membiayai pendidikan kejuruan. Strategi melibatkan swasta ini cukup efektif karena peserta didik mempelajari keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga tingkat pengangguran kaum muda kecil.

Penambahan SMK perlu dikendalikan dengan mengutamakan kualitas pembelajaran yang membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dasar, keterampilan teknis, dan karakter. Lulusan SMK yang sudah jenuh dan terbanyak menjadi penganggur seperti Manajemen dan Administrasi Perkantoran hendaknya dimoratorium. Karena Penambahan jumlah SMK yang tidak memperhitungkan sisi kebutuhan dunia usaha/industri hanya akan membuat lulusan SMK menganggur. Untuk mengurangi pengangguran lulusan SMK, Kemendikbud bekerja sama dengan Kadin Propinsi menghitung kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

Pada 2015, jumlah SMK tercatat 12.689. Pada tahun ini, jumlahnya bertambah jadi 13.150 atau dalam setahun

bertambah 461 SMK. Adapun SMK dengan kualitas yang dinilai baik dan layak untuk menjadi rujukan hanya sekitar 1.350 institusi. Dalam lima tahun ke depan, sejak 2015, ditargetkan 1.650 SMK sebagai sekolah rujukan. Sekolah ini menjalin kerja sama dengan minimal 75 dunia usaha/industri, memiliki guru dengan paket keahlian, dan jumlah siswa minimal 1.000. Ada 6.000 SMK kecil yang memiliki 100-200 siswa, terutama yang didirikan pihak swasta (Kompas, 29 Oktober 2015).

Pengembangan SMK, terutama di bawah Kemdikbud, selama ini dengan pendekatan *supply driven*. Tampak bahwa program keahlian yang dibuka lebih banyak tak berdasarkan potensi usaha/industri yang ada di daerah. Karena itu, harus ada keberanian dari Kemdikbud untuk meminta pemerintah daerah agar jangan mudah memberi izin pembukaan SMK baru yang tidak sesuai potensi usaha/industri yang ada. Pendekatan pengembangan SMK harus bergeser dari *supply driven* menjadi *demand driven* untuk memenuhi kebutuhan usaha/industri.

Masalahnya adalah seolah-olah tidak ada pemetaan tentang ketenagakerjaan. Mestinya, Kemendikbud bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenristek Dikti agar ketenagakerjaan kita lebih tertata (Suko Wijono, 2016: 2).

## **2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan**

Dalam revitalisasi SMK, Kemendikbud memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*). Hal ini

disebabkan dunia usaha/industri saat ini mengeluhkan rendahnya kualitas lulusan SMK. Kualitas lulusan sangatlah ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah, dan kurikulum. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Kelemahan dalam mendisain dan mengembangkan kurikulum merupakan salah satu faktor yang menimbulkan keluhan dunia usaha/industri di atas. Untuk mengatasi berbagai keluhan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sedang giat-giatnya memperbaiki kurikulum. Kurikulum selalu diperbaiki sesuai tuntutan zamannya.

Perbaikan kurikulum seharusnya dilakukan dunia usaha/industri yang mengetahui kebutuhannya sehingga kurikulum MK benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha/industri. Pemerintah hendaknya memberikan apresiasi berupa keringanan pajak bagi dunia usaha/industri yang telah membantu pengembangan SMK.

Perubahan kurikulum pada pendidikan vokasi harus masuk pada persoalan substansi. Artinya, bukan hanya bicara bagaimana mengedepankan praktik lebih banyak daripada teori, melainkan juga bagaimana membuat rencana bisnis (*bussines plan*) dan menerapkan rencana bisnis tersebut serta memasarkan barang/jasa dari hasil keterampilan peserta didik kepada masyarakat luas.

Kompetensi lulusan SMK masa depan menurut Trilling & Fadel adalah (1) *critical thinking and problem solving*, (2) *creativity and innovation*, (3) *collaboration, teamwork, and leadership*, (4) *cross-cultural understanding*, (5) *communications, information, and media literacy*, (6) *computing*

and ICT literacy, (7) career and learning self-reliance; sedangkan menurut Pearson-Learning Curve Report, 2014: (1) leadership, (2) digital literacy, (3) communication, (4) emotional intelligence, (5) entrepreneurship, (6) global citizenship, (7) problem solving, dan (8) team-working. Jika digabung, maka kompetensi lulusan SMK masa depan adalah: (1) leadership, (2) digital literacy, (3) communications, information, and media literacy, (4) emotional intelligence, (5) entrepreneurship (creativity and innovation), (6) global citizenship, (7) critical thinking and problem solving, dan (8) collaboration team-working, (9) cross-cultural understanding, dan (10) career and learning self-reliance.

Dari ke-10 kompetensi lulusan SMK masa depan di atas, kompetensi *entrepreneuershi* yang terpenting karena: (1) agar lulusan menjadi pencipta lapangan kerja bukan pencari kerja sehingga pengangguran lulusan dapat dikurangi; dan (2) jika kompetensi *entrepreneurship* sudah dimiliki maka ke-9 kompetensi lainnya sudah harus tercakup di dalamnya.

Menurut Rosan Perkasa Roeslani (2016: 2), menyatakan bahwa lulusan SMK bukan siap pakai tetapi siap latih. Mereka masih kurang terjun langsung ke lapangan dan kurang praktik kerja lapangan/magang. Pada hal, dunia usaha/industri tengah membutuhkan lulusan SMK yang terampil. Indonesia kekurangan tenaga kerja yang mumpuni menjadi faktor padat karya tidak berkembang seara optimal. Sebagai contoh, produk industri tekstil Indonesia sekarang kalah bersaing dengan Vietnam. Tahun 2005, ekspor tekstil Indonesia US \$ 8,6 M, sedangkan Vietnam US \$ 5,3 M. Namun, sembilan tahun kemudian, tahun 2014 ternyata

Vietnam lebih unggul, ekspor tekstil Indonesia US \$ 12,7 M, dan Vietnam US \$ 26 M. Pada hal penduduk Vietnam hanya 60 juta dan tenaga kerja produktif 25 juta.

### **3. *Link and Match* SMK dengan Dunia Usaha/Industri**

Menurut Hariyadi B. Sukamdani (2016: 2), pendidikan harus ditata kembali agar sinkron dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Pada hal dunia usaha/industri membutuhkan tenaga terampil yang mumpuni. Ke depan, yang sifatnya ilmu terapan harus diperbesar kapasitasnya. Kalau mau menjadi negara industri, pemerintah harus membenahi mutu pendidikan. Indonesia memiliki potensi yang besar menjadi negara industri. Untuk maksud tersebut, perlu melaksanakan program *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri. Pendapat ini mendukung pendapat Wisnuwardana (201: 11) yang menyatakan agar mendorong pemerintah melaksanakan *link and match* SMK dengan dunia usaha/industri segera diwujudkan, tetapi tidak sekedar menjadi jargon yang ada di atas awing-awang.

Konsep *link and match* antara program studi di SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri hanyalah jalan pintas yang bersifat jangka pendek untuk mengurangi angka pengangguran. Namun, konsep tersebut tidak moderat karena hanya mengandalkan kemampuan dunia usaha/industri untuk menampung praktik kerja industri, magang peserta didik/guru, dan penempatan lulusan SMK. Idealnya, pengembangan vokasi, baik itu SMK, akademi komunitas, maupun politeknik, harus diarahkan pada

penguatan kewirausahaan. Sebab, dengan bekal kompetensi kewirausahaan yang dimiliki lulusan pendidikan vokasi, mereka diharapkan mampu mengembangkan diri menjadi wirausahawan. Sebagai wirausahawan, maka lulusan SMK bukan mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan kerja.

Penguatan kewirausahaan tersebut sesuai dengan usaha pemerintah untuk menambah jumlah wiraswastawan. Jumlah wirausahawan nasional saat ini hanya 1,56% dari jumlah penduduk; sedangkan Singapura sudah mencapai 7% dan Malaysia 5%. Oleh karena itu, mendidik calon-calon wirausaha sejak dini merupakan keharusan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain dan untuk menggeliatkan perekonomian nasional.

*Link and match* SMK dengan dunia usaha/industri bukan hanya sebatas agar peserta didik dapat melaksanakan praktik kerja industri tetapi juga lebih ditekankan pada upaya pembelajaran bagaimana dunia usaha/industri tersebut bisa berjalan. Artinya, bukan hanya transfer ipteks, tetapi juga juga transfer pengalaman terbaik (*best practice*) yang lebih bermakna dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, dunia usaha/ industri dapat menjalankan program inkubasi bisnis dan memberikan pendampingan kepada lulusan-lulusan pendidikan vokasi. Hal ini karena pada prinsipnya industri juga membutuhkan pasokan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk proses produksinya. Tidak tertutup kemungkinan beberapa kebutuhan dari industri besar disediakan oleh wirausaha muda hasil pendampingan dari industri yang bermitra dengan SMK tersebut.

Selanjutnya, pendanaan menjadi bagian yang ikut menentukan sukses tidaknya program kewirausahaan dalam pendidikan vokasi. Oleh karena itu, Kerja sama antara Kemdikbud dengan 12 Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan 34 Gubernur se-Indonesia bahkan pengguna lainnya adalah syarat mutlak, khususnya Kemendikbud harus menggandeng perbankan BUMN agar lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama secara sinerjis. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kadin juga perlu dilibatkan selaku pembina usaha-usaha kecil menengah dan fasilitator bagi tumbuh kembangnya wirausaha nasional. Masalahnya menurut Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat (Kopi Darat), 2016: 11) adalah keragaman kondisi daerah dan komitmen pemerintah daerah telah memicu kesenjangan mutu pendidikan.

Pernyataan di atas mendukung pendapat Aulia Wijiasih (2016: 11) yang menyatakan bahwa tak banyak daerah yang fokus pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pengawas, guru hingga masyarakat. Selain itu, masih sedikit pemerintah daerah yang menerapkan dengan sungguh-sungguh layanan pendidikan yang berkualitas. Dana pendidikan paling mudah dihabiskan untuk sarana dan prasarana. Namun akses pendanaannya terbatas untuk sekolah tertentu karena tidak banyak pejabat yang mengeahui secara baik permasalahan pendidikan di daerah mereka. Peta mutu pendidikan di daerah tidak ditindaklanjuti dalam bentuk upaya perbaikan yang nyata. Bahkan sekolah

merekayasa evaluasi mandiri emi mengejar status akreditasi sekolah yang bagus. Sekolah ingin memiliki status sebagai sekolah favorit (Aulia Wijiasih, 2016: 11).

#### **4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan**

Kompetensi adalah pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skills*) yang wajib dimiliki guru untuk menjalankan tugasnya. Kompetensi yang dimiliki guru seperti pendapat Anonim (2012: 6) di atas dan Gambar 3. Keterampilan Guru Profesional Abad 21 di atas.

Para pakar pendidikan sepakat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa guru adalah faktor terpenting yang menentukan proses dan hasil belajar siswa. Kesepakatan ini mendukung pendapat Anonim (2012: 4) menyatakan, “*Since the quality of the teacher is the single biggest in school factor predicting student achievement, effective teachers and school leaders are very heart of educational policy.*” (Sejak kualitas guru sebagai faktor terpenting di sekolah yang menentukan hasil belajar peserta didik, guru dan kepala sekolah efektif adalah hal sangat penting dalam kebijakan pendidikan).

Menurut Weilin (2016: 11), pembelajaran yang dilakoni peserta didik selama ini belum cukup memberikan bekal kepada peserta didik untuk menjadi individu andal menghadapi kehidupan kian modern yang menuntut kompetensi tinggi. Para guru pun belum optimal diberdayakan agar mampu mendampingi siswa belajar. Sebab, peserta didik lebih diajarkan dengan cara ceramah dan tidak didampingi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang baik, yang relevan dengan kecakapan abad 21. Pernyataan Weilin ini mendapat dukungan Henny

Supolo (2016: 11) yang menyatakan bahwa dia yakin, sumber utama kemajuan pendidikan Indonesia yang bergerak lambat secara kualitas, karena kekuatan guru sebagai pendidik tidak pernah dipandang serius oleh pemerintah. Selanjutnya, menurut Henny Supolo (2016: 11), guru seharusnya mampu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21. Tuntutan itu mencakup membekali siswa kecakapan kerja sama, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Guru harus menerapkan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran reflektif. Dengan pembelajaran kontekstual, guru mampu memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolahnya dan dengan pembelajaran reflektif, guru memampukan peserta didik memaknai materi yang diajarkan untuk kepentingan hidup dan penghidupan peserta didik. Sulit untuk mengembangkan kompetensi abad 21 secara komprehensif jika proses pembelajaran tidak dibenahi (Henny Supolo, (2016: 11).

Untuk mendapatkan guru yang hebat, maka guru harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi guru yaitu: mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Khusus untuk kompetensi mengajar, guru harus mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran siswa.

Guru dituntut untuk mengikuti program Guru Pembelajar agar kompetensinya selalu meningkat. Selain siswa belajar, guru juga belajar. Sebagai contoh, saat peserta didik melaksanakan praktik memasang batu bata, guru juga

ikut memasang batu bata. Guru tidak hanya melihat saja tetapi ikut mencontohkan.

Menurut Rosan Perkasa Roeslani (2016: 2), alumnus SMK terlalu banyak mendapatkan teori dan kurang pengajaran secara penuh di lapangan. Ia telah melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo menyambut baik gar mutu SMK siap pakai.

Data Direktorat Pembinaan Guru Dikmen (2015) menemukan bahwa nilai UKG guru hanya 5% amat baik bertolak belakang dengan nilai Penilaian Kinerja Guru yang dilakukan kepala dan pengawas terhadap guru yang dibinanya ternyata 95% amat baik bahkan ada satu sekolah nilai PKG 100% amat baik.

Penilaian tidak objektif oleh kepala dan pengawas di atas terjadi antara lain karena: (1) menilai guru yang dibinanya berarti pembinaannya gagal; (2) kepala dan pengawas sekolah sangat sibuk bahkan ada pengawas yang tidak pernah ke sekolah membina gurunya karena tidak disediakan uang transport; (3) malu bertemu gurunya karena gurunya lebih pandai dari pengawasnya karena guru dilatih K-13, pengawas dan kepala sekolahnya tidak; (4) ada guru yang disuruh menilai sendiri dirinya dan kepala serta pengawas sekolah hanya tinggal tanda tangan; (5) guru yang PKG-nya dinilai amat baik ternyata tidak mencerminkan “kehebatannya” dalam mengajar dan mendidik peserta didik karena semakin hebat guru, semakin banyak tugas yang diberikan kepala sekolahnya; akibatnya guru yang tidak hebat punya banyak waktu untuk mengurus kenaikan pangkatnya.

## **5. Sertifikasi Guru SMK Produktif**

Pasar kerja nasional dan internasional menuntut tersedianya tenaga-kerja yang kompeten di setiap bidang, banyak industri dan organisasi mempersyaratkan agar tenaga-kerjanya memiliki sertifikasi kompetensi yang kredibel. Oleh karena itu, guru SMK Produktif selayaknya memiliki kompetensi yang diakui oleh BNSP sesuai dengan paket keahlian di SMK. Di berbagai negara, pemerintahnya menghendaki bahwa tenaga kerja yang ingin bekerja harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga otoritas yang disahkan oleh pemerintah. Kompetensi adalah spesifikasi dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dipersyaratkan. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi, maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasainya.

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen, guru profesional mempunyai empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Guru yang telah mempunyai sertifikat profesi bermakna bahwa secara umum guru tersebut telah mempunyai empat kompetensi utama. Khusus guru SMK Produktif, selayaknya mempunyai sertifikat kompetensi minimum satu sertifikat yang sesuai

dengan pelajaran yang diampu. Sertifikat kompetensi akan memperkuat kompetensi profesional guru SMK mata pelajaran produktif.

Manfaat sertifikasi guru adalah untuk:

- (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru;
- (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas, dan Tidak professional;
- (3) meningkatkan kesejahteraan guru;
- (4) memenuhi kelayakan guru dalam melaksanakan tugas;
- (5) meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa;
- (6) meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan; dan
- (7) menjamin harkat dan martabat guru.

Seorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. Kecakapan kerja tersebut diwujudkan dalam unjuk kerja yang bermakna, bernilai sosial, dan memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui dan disahkan oleh BNSP. Secara nyata orang yang kompeten mampu bekerja di bidangnya secara efektif dan efisien. Kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjuk kuantitas kerja tetapi sekaligus menunjuk kualitas kerja.

Cara melaksanakan sertifikasi guru SMK produktif adalah sebagai berikut.

### **Tahap Persiapan**

Persiapan yang perlu dilakukan dalam sertifikasi kompetensi guru produktif SMK yaitu meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki baik secara mandiri maupun melalui lembaga diklat untuk diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berhubungan dengan kompetensi paket keahlian:

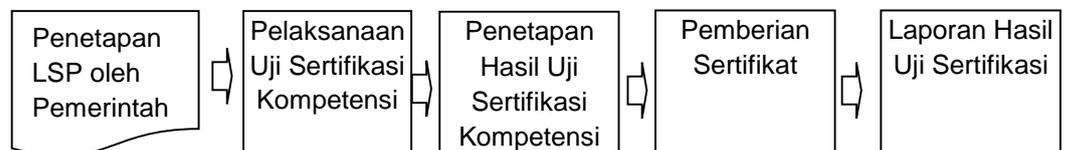
- (1) pendataan guru SMK Produktif dan paket keahlian secara nasional;
- (2) pendataan LSP yang sudah terlisensi Badan Nasional Standar Profesi (BNSP);
- (3) pemetaan sebaran guru produktif dan LSP;
- (4) penetapan peserta dan tempat uji sertifikasi kompetensi;
- (5) penjadwalan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi;
- (6) pemberitahuan LSP yang akan melaksanakan uji sertifikasi kompetensi; dan
- (7) sosialisasi uji sertifikasi kompetensi guru SMK Produktif.

Proses sertifikat keahlian guru SMK produktif diupayakan linier dengan latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pengalaman kerja. Sebelum uji sertifikasi kompetensi dilakukan sosialisasi yang intens kepada guru produktif, termasuk memberikan kisi-kisi uji sertifikasi kompetensi.

### **Tahap Pelaksanaan**

- (1) Penetapan LSP oleh pemerintah.
- (2) Pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP yang sudah terlisensi BNSP.
- (3) Penetapan hasil uji sertifikasi kompetensi oleh LSP.

- (4) Pemberian sertifikat kompetensi guru SMK Produktif yang telah lulus.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.



**Gambar 4. Mekanisme Uji Sertifikasi Kompetensi Guru SMK Produktif**  
**Evaluasi**

1. Pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.

Evaluasi pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP penyelenggara. LSP secara berkala diaudit oleh BNSP sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.

2. Evaluasi hasil sertifikasi kompetensi

Evaluasi hasil uji sertifikasi kompetensi dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Ruang lingkup evaluasi meliputi:

**a. Kompetensi Guru Produktif dan Pengembangan Diri**

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak sertifikasi kompetensi dan hubungannya dengan kinerja guru. Kinerja guru ini terkait dengan pengembangan kompetensinya terhadap perkembangan teknologi.

**b. Peningkatan Kualitas Peserta Didik**

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak program terhadap peningkatan kualitas

hasil belajar khususnya terhadap keterampilan peserta didik.

### **c. Pengakuan Dunia Usaha/Industri**

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui:

1) dampak program terhadap daya serap lulusannya di dunia usaha/industri.

respons guru terhadap perkembangan teknologi yang ada di dunia usaha/industri.

## **6. Kepemimpinan Kepala SMK Masa Depan**

Kepala sekolah adalah “imam” di sekolahnya. Sebagai “imam”, semua ucapan dan gerak geriknya akan diikuti pengikutnya (“makmum”nya). Jika “imam” salah, pengikut akan menegurnya, dan ia dengan tulus ikhlas membetulkannya. Sebagai “imam”, ia rela melepaskan jabatannya (*legowo*) jika telah tiba saatnya dan ikhlas kembali menjadi makmum.

Pembelajaran tidak saja terjadi di dalam sekolah tetapi juga di luar sekolah sehingga terjadi keterkaitan yang kuat antara teori dan praktiknya di masyarakat. Pembelajaran menjadi semakin bermakna bagi kehidupan dan penghidupan siswa, jika pembelajaran bermanfaat bagi siswa tersebut.

Kepemimpinan SMK masa depan adalah kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), kepemimpinan visioner, dan kepemimpinan perubahan (Briedt, 2005) karena SMK merupakan tempat belajar. Jadi, kepemimpinan yang relatif tepat adalah kepemimpinan

pembelajaran. Oleh sebab itu, salah satu variabel penilaian kepala sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran. Kepala SMK perlu sebagai leader agar mampu mempengaruhi guru dan warga sekolah, mampu memotivasi dan memberdayakan guru dan warga sekolah.

Namun, kenyataannya, Kepala SMK lebih cenderung melaksanakan kepemimpinan manajerial yang berkenaan dengan administrasi SMK karena tuntutan birokrasi pemerintahan. Kepala sekolah se-Indonesia sangat disibukkan urusan administratif sehingga jam wajib mengajar enam jam tidak terpenuhi. Biasanya digantikan oleh guru pengganti yang ditunjuk kepala sekolah. Terlebih-lebih jika kepala sekolahnya termasuk kepala sekolah berprestasi atau sekolahnya terkenal. Semakin banyak tamu yang studi banding. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebaiknya harus dibebaskan dari mengajar dan ia berperan sebagai administrator.

Peranan kepala sekolah sebagai *manager*, ia lebih fokus pada pengawasan (supervisi), pemantauan, pengorganisasian, dan penilaian kinerja guru (Kowalki, 2010: 22). Peranan manajer menurut Stoner & Freedman, 2000 seperti gambar berikut.



**Gambar .... Peranan Kepala Sekolah sebagai Manajer**

Peranan kepala sekolah sebagai *leader*, ia lebih fokus pada pengembangan (perubahan) sekolah, penginisiatif struktur baru atau pengubah operasional, pembuatan keputusan tentang apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan sekolah, pembuat keputusan visi, penjelas visi kepada *stakeholders* sekolah, dan pembina budaya sekolah (Kowalki, 2010: 22).

Kowalski (2010: 23) menyatakan:

*Nevertheless, many books on school admnistration, including this one, define it as a comprehensive concept that encompasses both management and leadership functions as depicted in figure. Based on the conviction that effective principals must lead and manage, principals are viewed as administrators who*

*continuously transition between and coordinate their leadership and management functions.*

(Meskipun demikian, beberapa buku administrasi sekolah, termasuk satu di antaranya buku ini, mendefinisikan konsep administrasi secara mendalam dan menyeluruh yang mencakup keduanya yaitu manajemen dan kepemimpinan. Berdasarkan keyakinan ternyata kepala sekolah efektif harus memimpin dan mengelola, kepala sekolah dipandang sebagai administrator yang secara terus-menerus mentransisi dan mengkoordinasikan antara fungsi kepemimpinan dan manajemen).



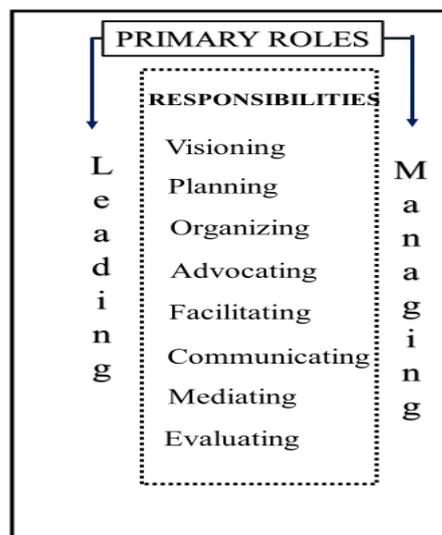
**Gambar ..... Konseualisasi Kepala Sekolah sebagai Administrator (Kowalski, 2010: 24).**

Pendapat Kowalski di atas mendapat dukungan Sharma (2009: 67) yang menyatakan bahwa keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya membutuhkan keseimbangan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat seperti yang dinyatakan Sharma (2009: 67), *“Success in organizations requires balance of both leadership and management.”* (Sukses dalam organisasi membutuhkan keseimbangan keduanya yaitu kepemimpinan dan manajemen). Ditambahkan pula oleh Sharma (2009: 94), *“For an educational administrator,*

*balancing responsibilities between leadership and management is key.*” (Untuk seorang administrator pendidikan, keseimbangan tanggung jawab antara kepemimpinan dan manajemen adalah kunci keberhasilan).

Peranan kepala sekolah sebagai *entrepreneur* bukan berarti ia menjadi pengusaha di perusahaan mencari untung sebanyak-banyaknya tetapi ia diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola dan memimpin sekolahnya. Kepala sekolah menerapkan jiwa wirausaha di dalam dan di luar sekolah seperti: inovatif, kerja keras, motivasi kuat, pantang menyerah, dan naluri kewirausahaan.

Peranan utama kepala sekolah menurut Kowalski (2010) yaitu sebagai *leader, manager* dengan tanggung jawab umum seperti gambar berikut.



**Gambar .... Peranan Utama dan Tanggung Jawab Umum Kepala Sekolah (Kowalski, 2010; 28)**

Semakin terkenal seorang kepala sekolah dengan prestasi kerjanya, semakin jarang dia berada di sekolah karena diundang sebagai nara sumber, instruktur, dan sebagainya; guru dan pengawas juga demikian.

Kepala dan pengawas sekolah cenderung fokus pada administrasi guru bukan pada perbaikan mengajar guru pada saat melakukan supervisi dan menilai kinerja guru. Banyak kepala dan pengawas sekolah tidak mampu memberi saran pedagogi kepada guru (Anonim, 2015). Penilaian kinerja guru oleh kepala dan pengawas sekolah tidak objektif dan cenderung sangat tinggi semua (Kompas, 2015: 15b). Memberi nilai sangat tinggi kepada kepala sekolah karena takut hasil pembinaan kepala dan pengawas sekolah terhadap guru dianggap gagal. Demikian pula halnya, pengawas sekolah cenderung memberi nilai sangat tinggi kepada kepala sekolah karena takut hasil pembinaan pengawas sekolah terhadap kepala sekolah dianggap gagal. Seharusnya yang menilai kepala sekolah adalah pihak independen dari perguruan tinggi dengan lulus dan bersertifikasi penilaian kinerja guru/kepala sekolah/pengawas sekolah terlebih dahulu bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

### **BAB III SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Pengembangan SMK**

- a. Peta jalan pengembangan SMK perlu diperbaharui dan dimantapkan dikerjakan secara sinerjis antar propinsi dan 12 kementerian terkait seperti dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016.
- b. Pengembangan SMK dengan komposisi 70% SMK berbanding 30% membawa konsekuensi penambahan biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana bengkel/laboratorium yang relatif mahal, penambahan guru produktif yang saat ini masih kurang, dan akan menambah pengangguran baru yang saat ini pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK.
- c. Pendekatan pengembangan SMK masih cenderung berjalan sendiri dan dunia usaha/industri juga berjalan sendiri.
- d. Prakerin peserta didik di dunia usaha/industri cenderung hanya tiga bulan sehingga keterampilannya masih meragukan. Akibatnya, banyak lulusan SMK tidak diterima di dunia usaha/industri.
- e. SMK yang berakreditasi A tidak mencerminkan mutunya.

##### **2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan**

- a. Softskill: Kewirausahaan yang meliputi: (1) *leadership*, (2) *digital literacy*, (3) *communications*,

*information, and media literacy, (4) emotional intelligence, (5) entrepreneurship (creativity and innovation), (6) global citizenship, (7) critical thinking and problem solving, dan (8) collaboration team-working, (9) cross-cultural understanding, dan (10) career and learning self-reliance.* Dan karakter kewirausahaan yang terdapat pada naskah penunjang oleh Nuryadin.

- b. Teknis: sesuai kemajuan ipteks yang berkembang di dunia usaha/industri.

### **3. *Link and Match* SMK dengan Dunia Usaha/Industri**

- a. *Link and match* belum berjalan efektif.
- b. SMK kesulitan mencari mitra dunia usaha/industri.
- c. Tidak ada dasar hukum yang mengikat agar dunia usaha/industri bermitra dengan SMK.
- d. Dunia usaha/industri merasa direpotkan atau terganggu oleh kehadiran peserta didik/guru SMK.
- e. Dunia usaha/industri khawatir mesin/alat rusak dan bahan praktik terbuang.
- f. *Link and match* masih bersifat formalitas, jarang ditindaklanjuti.
- g. Guru pembimbing dari industri belum memiliki keterampilan pedagogik.
- h. Siswa prakerin/magang lambat beradaptasi dengan budaya kerja dunia usaha/industri.

### **4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan**

- a. Kompetensi guru masih ketinggalan dunia usaha/industri.
- b. Masih cenderung ceramah atau berteori.
- c. Masih banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya.
- d. Guru produktif digantikan oleh guru normatif dan adaftif karena kekurangan guru produktif.
- e. Guru sangat disibukkan tugas administratif sehingga tidak sempat meningkatkan kompetensi dan mengurus pangkatnya terutama guru-guru yang hebat. Guru yang tidak hebat karena tidak banyak tugas dari kepala sekolah justru punya waktu mengurus pangkat.
- f. Senioritas dan tingginya pangkat guru tidak berkorelasi positif dengan proses dan hasil belajar peserta didik.
- g. Guru lebih disibukkan urusan administratif.

## **5. Sertifikasi Guru**

- a. Sertifikasi profesi guru belum berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik, baru berdampak pada kesejahteraan guru.
- b. Sertifikasi guru SMK produktif terkendala belum adanya Lembaga Sertifikasi Profesi untuk guru SMK produktif.
- c. Lulusan SMK wajib memiliki sertifikasi kompetensi, sedangkan gurunya masih banyak yang belum memiliki.

- d. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) relatif rendah berbanding terbalik dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG) oleh pengawas sekolah.

## **6. Kepemimpinan dan Peranan Kepala Sekolah**

- a. Kepala SMK masih disibukkan masalah administratif daripada akademik.
- b. Semakin hebat Kepala SMK, semakin jarang berada di sekolah.
- c. Kesibukkan Kepala SMK menjadikan ia jarang mengajar bahkan diserahkan ke guru lain.
- d. Kepemimpinan kepala sekolah SMK masa depan adalah kepemimpinan: pembelajaran, visioner, dan perubahan.
- e. Kinerja Kepala SMK relatif amat baik semua menurut penilaian pengawas sekolah karena kepala sekolah di bawah pembinaannya jadi harus amat baik nilainya.
- f. Peranan kepala sekolah secara teoretis adalah sebagai administrator yang meliputi manajer dan *leader*.
- g. Peranan manajer meliputi sebagai pengawas (supervisor), pemantau, pengorganisasian, penilai kinerja guru, interpersonal, informasional, dan decisional (*entrepreneur*, penangkal kesulitan, pengalokasi sumber daya, dan negosiator).
- h. Peranan sebagai *leader* meliputi pengembang sekolah sesuai standar pendidikan, penginisiatif

struktur baru atau pengubah pelaksanaan, pembuat keputusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sekolah, pembuat keputusan visi, penjabar visi kepada *stakeholders* sekolah, dan pembina budaya sekolah.

- i. Kepala sekolah yang efektif adalah administrator sekolah yang mampu menyeimbangkan peranannya sebagai manajer dengan *leader* secara terus-menerus.

## **B. Saran-saran**

### **Untuk Pembuat Kebijakan di Lingkungan Kemendikbud**

#### **1. Pengembangan SMK**

- a. Membuat Permendikbud tentang Peta Jalan SMK bersama seluruh propinsi dan 11 kementerian sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.
- b. Peta jalan SMK hendaknya disiapkan dengan semangat bukan yang disiapkan SMK (*supply demand*) tetapi dengan semangat memenuhi kebutuhan dunia usaha/industri untuk memastikan lulusan SMK tidak menjadi penyumbang angka pengangguran.
- c. Setiap propinsi bertanggung jawab membuat peta jalan pengembangan SMK bermitra dengan dunia usaha/industri.

- d. Revitalisasi SMK seharusnya mengutamakan mutu yang bertujuan agar lulusan mampu bersaing di dalam dan di MEA serta pasar global.
- e. Melaksanakan akreditasi ulang akreditasi SMA Negeri dan swasta oleh pihak independen dan tes asesor diperketat seperti halnya asesor BAN-PT. SMK yang tidak memenuhi syarat (SMK sastra karena tidak ada praktik) diberi waktu dua tahun untuk pemenuhan. Jika tidak mampu memenuhi standar minimal agar ditutup. Swasta yang akan membuka SMK harus melampirkan jaminan ke Pemda minimal 2 Milyar rupiah. Uang jaminan tersebut untuk melengkapi fasilitas bengkel dan lain-lain
- f. Melaksanakan moratorium SMK yang tidak dibutuhkan dunia usaha/industri dan gurunya alih fungsi menjadi guru SMK produktif.
- g. Membiayai guru pendamping/pembimbing dari dunia usaha/industri untuk mengikuti pelatihan pedagogi selama enam sampai satu tahun dengan seijin dunia usaha/industri sebagai jam kerja sehingga gaji tetap diterima utuh.
- h. Mewajibkan dunia usaha/industri yang memenuhi syarat untuk membina minimal tiga SMK dengan insentif dan sanksi yang tegas melalui pembuatan peraturan dan perundang-undangan.
- i. Meminta dunia usaha/industri menyusun kurikulum SMK.
- j. Mewajibkan dan membiayai siswa dan guru SMK magang di dunia usaha/industri.

- k. SMK diakreditasi oleh dunia usaha/industri yang memenuhi syarat.
- l. Pengembangan hendaknya menggunakan pendekatan tenaga kerja (*manpower approach*) karena lulusan SMK seyogyanya setelah lulus langsung untuk bekerja ikut orang lain atau berwirausaha.
- m. Pendekatan tenaga kerja mengharuskan pengembangan SMK bergeser dari *supply driven* menjadi *demand driven*. Konsekuensinya: moratorium paket keahlian yang sudah jenuh; kurikulum dibuat oleh dunia usaha/industri; perubahan kurikulum harus persetujuan dunia usaha/industri; prakerin/magang minimal satu tahun; ada raport dari dunia usaha/industri bagi peserta didik yang prakerin/magang; lulusan MK tidak perlu raport/ijazah tetapi sertifikasi keahlian; setiap siswa dapat memiliki lebih dari satu sertifikasi keahlian;
- n. Pengembangan SMK berupa penambahan SMK baru sebaiknya hanya membuka paket keahlian yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Paket keahlian seperti bisnis dan manajemen hendaknya dimoratorium. Guru-gurunya dialihfungsikan ke guru produktif.
- o. Prakerin/magang disarankan minimal satu tahun. Mata pelajaran teori:praktik 30:70 agar siswa lebih terampil

- p. Mendirikan SMK empat tahun sehingga mutu praktik peserta didiknya lebih diterima oleh dunia usaha/industri. Bagi lulusan yang ingin menjadi PNS perlu diusulkan ke Menpan RB tentang jenjang karier SMK 4 tahun.
- q. Membentuk Tim Revitalisasi SMK.

## **2. Kompetensi Lulusan SMK Masa Depan**

- a. Mata pelajaran yang imun (kebal) terhadap pengangguran adalah kewirausahaan.
- b. Kurikulum dibuat dan diubah oleh dunia usaha/industri sehingga sesuai kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/industri.
- c. Kompetensi utama adalah kewirausahaan agar lulusan mampu menciptakan lapangan kerja (tidak menganggur), bukan pencari kerja.
- d. Peserta didik memiliki lebih dari satu kompetensi keahlian.
- e. Mendapatkan satu kompetensi keahlian selama tiga tahun perlu ditinjau kembali.
- f. Komposisi pelajaran teori dan praktik 30%:70%.

## **3. *Link and Match* SMK dengan Dunia Usaha/Industri**

- a. Mempelopori membuat peraturan *link and match*.
- b. Membuat peraturan dan perundang-undangan *link and match*.
- c. Proaktif bersinerji dengan gubernur, dan 11 kementerian menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2016

tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Mutu SDM Indonesia.

- d. Membuat Permendikbud tentang pelaksanaan prakerin/magang dan *teaching factory* yang bersifat umum bersama dunia usaha/industri.
- e. Peserta didik melaksanakan prakerin/magang minimal satu tahun.
- f. Peserta didik didampingi/dibimbing oleh guru dari dunia usaha/industri yang memenuhi syarat terutama kompetensi pedagogi.
- g. Melaksanakan *dual system* SMK yang merupakan kemitraan yang erat SMK-dunia usaha/industri mengakibatkan lulusan terstandarkan dan terserap. SMK dapat mengembangkan sistemnya sendiri yang cocok.

#### **4. Kompetensi Guru SMK Masa Depan**

- a. Guru SMK masa depan direkrut dari Politeknik.
- b. Guru pendamping magang dari dunia usaha/industri.
- c. Membiayai Guru pendamping magang dari dunia usaha/industri untuk mengikuti bimtek pedagogi.
- d. Kompetensi guru SMK dan indikatornya dibuat bersama dunia usaha/industri.
- e. Guru SMK produktif harus memiliki sertifikat keahlian dan mengajar sesuai dengan sertifikatnya.
- f. Guru alih fungsi dilatih minimal satu tahun secara terur-menerus.

- g. Penilaian Kinerja Guru disamping dilakukan kepala dan pengawas sekolah juga dilakukan pihak independen seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), perguruan tinggi, orang tua, siswa, dan dunia usaha/industri (untuk SMK).

## **5. Sertifikasi Guru**

- a. Membuat Permendikbud tentang Sertifikasi Guru SMK Produktif.
- b. Membiayai guru SMK produktif (termasuk guru alih fungsi) untuk mengikuti uji sertifikasi guru produktif.
- c. Sertifikator sertifikasi harus dilakukan sesuai paket keahlian yang dibutuhkan dunia usaha/industri.
- d. Sertifikasi hendaknya dibuat tiga level sesuai level guru: pratama, muda, madya, dan utama.
- e. Perlu dibentuk organisasi profesi guru yang kelak akan menjadi anggota sertifikator Lembaga Sertifikasi Keahlian Guru SMK produktif.
- f. Sertifikator keahlian guru SMK produktif harus sesuai dengan paket keahlian.
- g. Sertifikat keahlian guru SMK produktif memiliki level yaitu: dasar, mahir, dan sangat mahir.
- h. Materi uji sertifikasi keahlian guru SMK produktif harus sesuai dengan kemajuan ipteks dan dibuat bersama dengan dunia usaha/industri.
- i. Masa berlaku sertifikasi berlaku maksimal lima tahun.

- j. Kesibukkan administratif guru dikurangi sebanyak mungkin.

## **6. Kepala SMK Masa Depan**

- a. Kepala SMK layaknya seperti *Chief Executive Office* (CEO) di dunia usaha/industri.
- b. Kepala SMK tidak mengajar tetapi menjadi CEO dan sebagai administrator dengan peranan sebagai manajer dan *leader* seperti pada simpulan di atas.
- c. Karakteristik kepemimpinan Kepala SMK masa depan adalah instruksional, visioner, dan *changer*.
- d. Pengangkatan Kepala SMK harus memiliki sertifikat sebagai calon Kepala SMK.
- e. Masa jabatan Kepala SMK sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Peranan kepala sekolah sebaiknya tidak mengajar tetapi sebagai administrator yang mampu menyeimbangkan peranannya sebagai manajer dan *leader* yang setara dengan 24 jam mengajar sehingga tidak kehilangan tunjangan profesi guru. Peranan sebagai manajer dan *leader* lihat simpulan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2007). *Manajemen berbasis sekolah*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Learning from leadership project: Investigating the links to improved student learning. Final report of research finding*. Minnesota: University of Minnesota.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Teaching and leadership for twenty-first century the 2012 international summit on teaching profession*. New York: Asia Society Partnership for Global Learning.
- Aulia Wijasih. (2016). Hasil UN tidak dimanfaatkan: Daerah dinilai belum betul-betul berkomitmen pada pendidikan. *Kompas*, 10 Desember: 11.
- Amich Al-humaini. (2016). Vokasi jangan abaikan kualitas. *Kompas*, 20 September: 13.
- Amich Al-humaini. (2016). Reformasi pendidikan vokasi, *Kompas*, 16 Juni: 13.
- Anonim. (2012). *Teaching and leadership for the twenty-first century the 2012 international summit on the teaching profession*.
- As'ari Djohar. (2007). *Pendidikan teknologi dan kejuruan*. Dalam ilmu dan aplikasi pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.
- Billet, S. (2011). *Vocational education purposes, traditions, and prospects*. London: Springer Science+Business Media.
- Bush, T. 2010. *Leadership and management development in education*. London: Sage Publication, Ltd.
- Cunningham , W.G., & Cordeiro, P.A. (2009). *Educational leadership a bridge to improved practice*. New York: Pearson.

- Direktorat Pembinaan SMK. (2006a). *Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan berstandar nasional*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Dunia Industri-Pendidikan Kian Bertaut. *Kompas*, 18 Desember 2016: 6.
- Greiner, L.E. (1972). Evaluation and revolution organization. *Harvard Business Review*. July-August: 75.
- Hasil FGD, *Penyelarasan Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja* pada hari Kamis, 21 di UNY Hotel.
- Hariyadi B. Sukamdani. (2016). Pendidikan belum penuh tuntutan dunia kerja. *Suara Pembaruan*. 9 Desember: 2.
- Hartarto. (2016). Dunia Industri-Pendidikan Kian Bertaut. *Kompas*, 18 Desember 2016: 6.
- Henny Supolo. (2016). Mutu perlu keseriusan: Kembangkan kecakapan siswa sesuai tuntutan abad ke-21. *Kompas*, 8 Desember: 11).
- Hoy. W.K., & Miskel, C.G. 2013. *Educational administration: theory, practice, and research*. 9th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Huber, G. S. 2010. *School Leadership International Perspective*. London: Springer.
- Husaini Usman. 2013. *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Edisi 4. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman & Nuryadin Eko Raharjo. 2013. "Strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013. *Cakrawala Pendidikan*. Februari 2013, Th. XXXII, No. 1, 1-15.
- Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

<http://www.voaindonesia.com/a/kerjasama-pendidikan-dan-ekonomi-fokus-kunjungan-jokowi-ke-jerman/3291766.html>

<http://www.voaindonesia.com/a/kerjasama-pendidikan-dan-ekonomi-fokus-kunjungan-jokowi-ke-jerman/3291766.html>

Kebijakan vokasi, kebijakan pendidikan vokasi, *Kompas* (2016). 18 Oktober: 6.

Kepala sekolah diuji: Kelemahan pada supervisi, *Kompas*, 19 Maret 2015a:11)

Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat (Kopi Darat), 2016: 11) Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat (Kopi Darat). Hasil UN tidak dimanfaatkan: Daerah dinilai belum betul-betul berkomitmen pada pendidikan. *Kompas*, 10 Desember: 11.

Kualitas kepek rendah: Perekrutan kepala dan pengawas sekolah belum ideal. *Kompas*, 8 Juni 2015b: 15.

Leitwood, K., Louis, K.S., Anderson, S., & Wahlstrom, K. 2004. *Learning from leadership project review of research how leadership influences student learning*. Minnosita: Carey, OISE, dan The Wallace Foundation.

Levin, B. 2012. *How to change 5000 schools a practical and positive approach for leading change at every level*. Third Printing. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P., & Stanco, G.M. 2012. *TIMSS 2011 international results in science*. Chestnut, MA, USA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Menteri Perindustrian. 2016. Dunia Industri-Pendidikan Kian Bertaut. *Kompas*, 18 Desember 2016: 6.

Newstrom, E., & Davis, K. (1997). *Oranization behavior, human behavior at work*. New York: McMillan.

OECD. 2009. *Improving educational leadership. Tool kit*.

- Pavlova, M. (2009). *Technology and vocational education for sustainable development, empowering individuals for the future*. Australia: Springer.
- Pearson-*Learning Curve Report* ( 2014).
- Pendidikan vokasi kerja besar pemerintah-kadin, *Kompas*, 2 Desember: 12.
- Pendidikan kejuruan janjikan masa depan: Saatnya ubah cara pandang, *Kompas*, 23 Mei 2016: 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Perbaiki Standar Nasional Guru, *Kopas*, 14 Desember 2012: 11.
- Petersen, A.C. (2011). *Educational partnerships: Conneting schools, families, and the communities*. Washington: Sage.
- Prosser, C.A. & Quigley, T.H. (1950). *Vocational education in a democracy*. Revised Edition. Chicago: American Technical Society.
- Pojok. *Kompas*, 19 Desember 2016: 6.
- Reinhartz, J., & Beach, D.M. (2004). *Educational leadership: Changing school, changing roles*. New York: Pearson.
- Rojewski. J.W. (2009). A conceptual framework for technical and vocational education and training. Dalam R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of education for the changing world of work, bridging academic and vocational learning* (pp. 11-39). Bonn, Germany: Springer Science+Bussines Media.

- Rosan Perkasa Roeslani. (2016). Pendidikan belum memenuhi tuntutan dunia kerja. *Suara Pembaruan*. 9 Desember: 2.
- Schleicher, A. 2012. *Preparing teacher and developing school leaders for the 21<sup>st</sup> century lessons from around the world*. Paris: OECD Publishing.
- Slamet PH. (2011). Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Juni 2011. Th. XXX, No. 2.
- Slamet PH. (2013). Pengembangan SMK model untuk masa depan. *Cakrawala Pendidikan*, Februari 2013: 14.
- Subandi Sarjoko. (2016). *Peningkatan kualitas pendidikan profesi guru melalui revitalisasi LPTK*. Jakarta: Kementerian PPN/Bapenas.
- Suko Wijono. (2016). Pendidikan belum memenuhi tuntutan dunia kerja. *Suara Pembaruan*. 9 Desember: 2.
- Suyanto. (2008a). *Peran SMK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Suyanto. (2008b). *Peranan SMK kelompok teknologi terhadap pertumbuhan industri manufaktur*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Tajuk rencana kebijakan pendidikan vokasi. Kompas*, 18 Oktober 2016: 6.
- Thompson, J. F. (1973). *Foundation of Vocational Education Social and Philosophical Concepts*. Paterson: Prentice.
- Tuckman, B.W. (1982). Development sequence in small group. *Psychological Bulletin*, 1985: 63).
- Trilling & Fadel. (2009). *21 century skill learning for live in our times*

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Vokasi Bukan lagi “Kelas Dua” *Kompas*, 26 Desember 2016: 6.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah menengah kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.
- Weilin. (2016). Mutu perlu keseriusan: Kembangkan kecakapan siswa sesuai tuntutan abad ke-21. *Kompas*, 8 Desember: 11).
- Wenrich, R.C., Wenrich, J.W., & Galloway, J.D. (1988). *Administration of vocational education*. Homewood, Illinois: American Technical Publishers, Inc.
- Wisnuwardhana. (2016). Pendidikan belum penuhi tuntutan dunia kerja. *Suara Pembaruan*. 9 Desember: 2.
- Xu Jinjie. (2007). *Work-based learning helps the youth development*. China: East China Normal University. Diambil pada tanggal 12 November 2016 dari <http://www.tuc.dk>.
- Yono. (2014). Model “Diklastris” sebagai alternatif meningkatkan mutu lulusan SMK. *Jurnal Pendidikan Sains*. Vol.2, No.3, September 2014, Hal 125-131.